

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Media Online

##### 4.1.1 Republika.co.id

##### 4.1.1.1 Profil dan Sejarah Singkat

Lahirnya Republika Online (ROL) tak terpisahkan dari perjalanan panjang Republika Koran. Republika adalah koran nasional yang lahir dari perjuangan kalangan komunitas Islam di Indonesia dan didorong oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh BJ Habibie, menjadikan Republika memiliki kuasa atas izin penerbitan oleh pemerintah. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah (<https://www.republika.co.id/page/anniversary> , diakses 28 November 2019). Nama Republika merupakan ide dari Presiden Soeharto yang sebelumnya akan diberi nama “Republik”, lalu Presiden Soeharto menambahkan huruf “A” dibelakangnya sehingga menjadi “Republika”. Pada akhirnya Koran Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993, yang diresmikan oleh Presiden Soeharto (Mahmuda, *skripsi*, 2013: 60).

Melalui PT Abdi Bangsa Tbk sebagai penerbit Republika, menjadikan perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan publik. Mulai tahun 2004, Republika dikelola oleh PT Republika Media Mandiri (RMM ). Sementara PT Abdi Bangsa naik menjadi perusahaan induk ( *Holding Company*). Di bawah PT RMM, Republika terus melakukan inovasi penyajian. Segala kreativitas dicurahkan untuk menyajikan informasi dan layanan yang lengkap bagi pembaca dan memenuhi

keinginan publik. Dan saat ini, RMM berada di bawah bendera PT. Mahaka Media Tbk.

Dua tahun setelah harian republika terbit, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1995. Republika menyajikan layanan berita di situs web internet, dengan alamat url [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Ini merupakan Koran pertama di Indonesia yang tampil di dunia internet, situs itu kemudian dinamakan Republika Online atau yang disingkat ROL. Sebagai situs berita, pada saat itu, muatan ROL hanya menduplikasi materi berita-berita koran Republika secara lengkap lalu di upload ke internet. Tujuan utama penerbitan Republika versi internet adalah untuk melayani pembaca yang tidak terjangkau distribusi koran cetak dan untuk pembaca yang berada di luar negeri (<https://www.republika.co.id/page/anniversary>, diakses 28 November 2019).

Pada fase berikutnya ROL secara bertahap mulai berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Desain dan berbagai layanan web dan materi berita pun lebih beragam. Sejak pertengahan 2008, ROL mengalami perubahan besar, dari sekadar situs berita sederhana menjadi web portal multimedia. Perubahan tersebut terjadi sebagai jawaban atas munculnya tantangan industri media yang mulai memasuki era konvergensi media. Dalam hal ini, Republika sebagai institusi industri media dituntut untuk memiliki dan mendistribusikan *content* medianya dalam format cetak, online, dan *mobile*. Untuk itulah ROL hadir sebagai “One Stop Portal Berbasis Komunitas”. Ada news, video, komunitas, sosial media, Digital *newspaper*, hingga *ecommerce*, yang menjadi muatan ROL. (<https://www.republika.co.id/page/anniversary>, diakses 28 November 2019).

Seiring berkembangnya informasi dan perkembangan sosial media, ROL menjadi portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi *hipermedia* dan *hiperteks*. Selain menyajikan

informasi, ROL juga menjadi rumah bagi komunitas-komunitas yang ada dibawah naungan Republika. ROL hadir dengan beragam fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. Adapun kanal-kanal tersebut dapat diakses di website [Republika.co.id](http://www.republika.co.id) sendiri yang diantaranya, Kanal News, Kanal Khazanah, Kanal Internasional, Kanal Ekonomi, Kanal Republikabola, Kanal Leisure, Kanal Kolom, Kanal Republika Tv, Kanal Konsultasi (<http://www.republika.co.id/page/about>, diakses pada 28 November 2018)

Adapun prinsip-prinsip dasar Republika online itu sendiri yakni, pertama, mengutamakan berita dan informasi interaktif dalam format *citizen journalism*. Kedua, memberi ruang luas bagi *content how to*, *tips*, *people*, dan *services*. Ketiga, santun, ramah dan akrab dengan keluarga. Keempat, dekat dengan semua komunitas. Kelima, mengutamakan berita dan informasi keislaman. Keenam, menyeimbangkan *god news* dan *bad news* dan ketujuh, menyajikan berita secara ringkas dan cepat, mudah diakses (Febriani, *Skripsi*, 2010: 44).

Dalam perkembangannya, pembaca media Republika online didominasi dengan kalangan muda muslim moderat. [Republika.co.id](http://www.republika.co.id) bertekad menjadi *beyond news* yang menyajikan informasi yang akurat, mendalam, serta dilengkapi dengan visualisasi yang memanjakan mata dan memuaskan pembacanya. Berdasarkan data statistik pengunjung [Republika.co.id](http://www.republika.co.id) meningkat sebesar 43,51% dibanding tahun 2016, dengan pembaca baru yang meningkat 23,90%, seiring meningkatnya jumlah pengunjung *pageview* juga meningkat 30,29% dan *session* mengalami peningkatan hampir 58,10%. Sehingga *time on site* atau lama orang bertahan saat membuka [republika.co.id](http://www.republika.co.id) adalah 3 menit 31 detik. Adapun data pengunjung [Republika.co.id](http://www.republika.co.id)

yang mengakses dengan menggunakan mobile sebanyak 77.512.041 pengunjung, desktop sebanyak 17.297.454 pengunjung, dan tablet sejumlah 2.569.795 pengunjung. Pengakses Republika.co.id pada usia yang produktif dengan kisaran umur 25-34 tahun sebanyak 35,77%, sedangkan umur 18-24 tahun sebanyak 25,84% (<https://www.republika.co.id/page/anniversary>, *video company profile*, diakses 28 November 2019).

Sedangkan, berdasarkan data Alexa.com (sebuah situs yang membuat *traffic rank* pada website), menunjukkan *traffic statistics* Republika.co.id berada pada urutan 57 di Indonesia, sedangkan berdasarkan urutan global berada pada peringkat 1.822 dunia (<https://www.alexa.com/siteinfo/republika.co.id>, diakses 29 November 2019).

#### **4.1.1.2 Visi dan Misi**

Berdasarkan pencarian terkait visi dan misi Republika online, dicatumkan pada website Republika.co.id (<https://www.republika.co.id/page/anniversary>, diakses pada 27 November 2019) bahwa visi dan misi sebagai berikut :

##### **1. Visi**

“ROL hadir di masyarakat dengan visi sebagai media online yang terintegrasi dan unggul.”

##### **2. Misi**

- a. Keberadaan ROL diarahkan untuk mengusung misi membangun umat Islam yang moderat, cerdas, dan berdaya.
- b. Menyuarakan aspirasi, gagasan, dan suara masyarakat bagi terbangunnya demokrasi yang sehat dan berkesejahteraan.
- c. Menciptakan manajemen yang sehat dan efektif.

#### 4.1.1.3 Struktur Media

Berikut struktur Republika online berdasarkan website [Republika.co.id](https://www.republika.co.id) (<https://www.republika.co.id/page/about>, diakses pada 27 November 2019) yang dibagi menjadi redaksi dan manajemen :

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>: PT Republika Media Mandiri</b>
<b>Komisaris Utama</b>	: Erick Thohir
<b>Wakil Komisaris Utama</b>	: Muhammad Lutfi
<b>Direktur Utama</b>	: Agoosh Yoosran
<b>Wakil Direktur Utama</b>	: Mira Rahardjo Djarot
<b>Direktur Operasional</b>	: Arys Hilman Nugraha
<b>Manager Senior Keuangan,SDM,Umum</b>	: Ruwito Brotowidjoyo
<b>Manager Senior Pengembangan Klien</b>	: Yulianingsih Yamin
<b>Manager Pengembangan Daerah</b>	: Indra Wisnu Wardhana
<b>Manager Promosi dan Event</b>	: HR Kurniawan
<b>Pemimpin Redaksi</b>	: Irfan Junaidi
<b>Wakil Pemimpin Redaksi</b>	: Nur Hasan Murtiaji
<b>Redaktur Pelaksana ROL</b>	: Elba Damhuri
<b>Wakil Redaktur Pelaksana ROL</b>	: Joko Sadewo
<b>Asisten Redaktur Pelaksana ROL</b>	: Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Rahardjo
<b>Tim Redaksi</b>	: Agung Sasongko, Bayu Hermawan, Esthi Maharani,Indira Rezkisari, Israr Itah, Yudha Manggala Putra,Dwi Murdaningsih, Nidia Zuraya, Nur Aini, Teguh Firmansyah, Andi Nur Aminah, Karta Raharja Ucu, Andri Saubani, Reiny Dwinanda, Ratna Puspita, Endro Yuwanto, Nashih Nasrullah, Friska Yolanda, Gita Amanda, Ani Nursalikhah, Hasanul Risqa, Christiyaningsih,

Havid Al Vizki, Wisnu Aji Prasetyo, Fakhtar Khairon Lubis, Fian Firatmaja, Surya Dinata Irawan

**Tim Sosmed** : Fanny Damayanti, Asti Yulia Sundari, Dian Alfiah,  
Ammar Said

**Tim IT dan Desain** : Mohamad Afif, Abdul Gadir, Nandra Maulana Irawan,  
Mardiah, Kurnia Fakhrini, Mariz

**Kepala Support dan GA** : Slamet Riyanto

**Tim Support** : Riky Romadon, Firmansyah, Abidin, Nurudin Toto  
Rahedi, Haryadi

**Sekred** : Erna Indriyanti

#### 4.1.1.4 Logo dan Tagline

Tagline Republika online adalah “Jendela Umat ” yang berarti Republika online menjadi bagian dari media umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan professional, dengan prinsip untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan kepentingan umat islam berdasarkan pemahaman *rahmatan lil ‘aalamiin* (Febriani, *Skripsi*, 2010: 44).

**Gambar 4.1 Tampilan Logo pada Halaman Utama Website**

**REPUBLIKA**.co.id

Sumber : <https://www.republika.co.id/>, diakses 02 Januari 2020.

**Gambar 4.2 Tampilan Logo pada Icon Website**



Sumber : <https://www.facebook.com/GeraiRepublika/>, diakses 02 Januari 2020.

#### **4.1.1.5 Alamat**

Berdasarkan website [Republika.co.id](http://Republika.co.id) (diakses 27 November 2019), alamat untuk Republika online berada di **Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext 308**. Adapun kontak person yang dapat dihubungi, ialah:

##### **Redaksi**

Phone: 021 7803747 ext 308

Fax: +6221 7997903

Email: [newsroom@rol.republika.co.id](mailto:newsroom@rol.republika.co.id)  
[sekretariat@republika.co.id](mailto:sekretariat@republika.co.id)

##### **Iklan**

Phone: 021 7803747 ext 231, 232

Fax: +6221 7997903

Email: [marketing@rol.republika.co.id](mailto:marketing@rol.republika.co.id)

##### **ROL Shop**

Riky Romadon

Phone: 021 7803747

Fax: 021-7997903

Email: [rolshop@rol.republika.co.id](mailto:rolshop@rol.republika.co.id)

#### **4.1.2 Voa-Islam.com**

##### **4.1.2.1 Profil dan Sejarah Singkat**

VOA-Islam.com merupakan portal berita melalui media online yang mengatasnamakan dirinya sebagai media dakwah Islam. VOA-Islam.com atau nama panjangnya yaitu “Voice of Al Islam”, didirikan di Bekasi, Jawa Barat April 2009 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Juni 2009. Latar belakang berdirinya media Voa-Islam atas dasar keprihatinan melihat realita umat Islam di Asia

Tenggara (pada khususnya) yang makin termarjinalkan oleh kapitalis, dan gerakan zionis melalui labelisasi sebagai ekstrimis, konservatif dan fundamentalis terhadap perjuangan dan dakwah islam yang haq, sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, salafus sholeh (Rasulullah, generasi Tabiin dan Tabiut Tabiin). Media ini berupaya menyuarakan kepentingan Islam dan umat Islam. Adapun yang menjadi dasar pemikiran media ini diambil dari ayat Al-Qur'an surah An Nahl ayat 125, Al Hujurat ayat 6, dan Ash Shaff ayat 10-12 (<https://www.voa-islam.com/about>, diakses pada 27 November 2019).

Berdasarkan website VOA-Islam.com (diakses 27 November 2019) dapat diakses bahwa terdapat beberapa kanal, antara lain : Kanal Indonesiana, Kanal World, Kanal Islamia, Kanal CounterFaith, Kanal Tekno+Mil, Kanal Muslimah, Kanal SmartTeen, Kanal ShareVoices, Kanal SyariahBiz, dan Kanal IDC. Berdasarkan data Alexa.com , menunjukkan bahwa *traffic statistics* Voa-Islam.com berada pada urutan 3.421 di Indonesia, sedangkan berdasarkan urutan global berada pada peringkat 185.239 dunia (<https://www.alexa.com/siteinfo/voa-islam.com> , diakses 29 November 2019).

#### **4.1.2.2 Visi dan Misi**

Visi dan misi Voa-Islam didapat berdasarkan hasil penelusuran pada website Voa-Islam.com (<https://www.voa-islam.com/about>, diakses pada 27 November 2019) :

##### **1. Visi**

- a. Menjadi media terpercaya yang mengedepankan kebenaran dan keadilan secara professional.
- b. Terwujudnya masyarakat muslim yang sadar akan kemuliaan dirinya dan peran serta tanggungjawab yang harus diembannya untuk terwujudnya sebuah peradaban yang bermartabat.



## 2. Misi

- a. Mendakwahkan Al Haq di mana saja, kapan saja, melalui media apa saja.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dan kapabilitas teknologi Informasi dan komunikasi umat Islam.
- c. Membangun dakwah online dan sebagai bentuk advokasi terhadap umat Islam Asia Tenggara.
- d. Menjaga keutuhan dakwah, sunnah, dan perjuangan umat islam.
- e. Menjadi media Islam Online rujukan di Indonesia dan Asia Tenggara, Insyaallah.
- f. Menyampaikan informasi berimbang tentang eksistensi dan permasalahan umat islam di Asia Tenggara khususnya, dan dunia pada umumnya.

### 4.1.2.3 Struktur Media

Berikut struktur voa-islam online berdasarkan website Voa-Islam.com (<https://www.voa-islam.com/about>, diakses pada 27 November 2019) yang terdapat pada bagian redaksi :

**Nama Perusahaan** : **PT. Visi Media Veteran**

**Pendiri / penanggung jawab:** Sabrun Jamil

**Redaktur Ahli** : Sabrun Jamil, Abu Vakha, Abu Faris, Abu Ammar  
, Munarman SH

**Pemimpin Redaksi** : Ibnu Syafaat

**Redaktur** : Badru Tamam, Robigusta Suryanto, Ria Fariana,  
Iwan Salino

**Reporter** : A. Furqan, Adi Permana

#### 4.1.2.4 Logo dan Tagline

Tagline voa-islam online yaitu “*Voice Of The Truth*”, yang artinya “Suara Kebenaran”. Hal ini menunjukkan bahwa situs ini ingin dimaknai sebagai penyaji informasi-informasi yang menitikberatkan pada ‘kebenaran’ (Akbar dkk, 2013: 44)

**Gambar 4.3 Tampilan Logo pada Halaman Utama Website**



Sumber : <https://www.voa-islam.com/>, diakses 02 Januari 2020.

**Gambar 4.4 Tampilan Logo pada Icon Website**



Sumber : <https://www.voa-islam.com/>, diakses 02 Januari 2020.

#### 4.1.2.5 Alamat

Berdasarkan website Voa-Islam.com (diakses 27 November 2019), alamat untuk voa-islam online berada di **Jalan Veteran 48A, Kota Bekasi, Jawa Barat.**

Kode Pos: 17141

Email: [redaksi@voa-islam.com](mailto:redaksi@voa-islam.com)

#### 4.1.3 Tempo.co

##### 4.1.3.1 Profil dan Sejarah Singkat

Tempo.co lahir tidak terlepas dari perjuangan Goenawan Mohamad beserta rekan – rekan nya yakni Fikri Jufri, Christianto Wibisono dan Usamah dengan meluncurkan majalah mingguan edisi perdana pada tanggal 06 Maret 1971

(<https://korporat.tempo.co/tentang/timeline>, diakses 27 November 2019).

Penamaan nama Tempo, memiliki empat alasan dasar pemilihan kata Tempo sebagai nama majalah. Pertama, nama itu singkat dan bersahaja, enak diucapkan oleh lidah Indonesia dari segala jurusan dan golongan. Kedua, nama itu terdengar netral, tidak mengejutkan ataupun merangsang. Ketiga, nama itu bukan simbol suatu mewakili suatu golongan. Dan keempat, makna dari kata “Tempo” yang berarti waktu (Sopian, 2009: 95).

Perjalanan Tempo bukannya tanpa rintangan, penuh akan proses perjuangan karena sering mengalami pembredelan oleh pemerintah. Pada 1982, untuk pertama kalinya, majalah Tempo dibredel karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim orde baru dan kendaraan politiknya, partai Golkar. Lalu, pada 21 Juni 1994, untuk kedua kalinya, majalah Tempo dibredel pemerintah melalui menteri penerangan Harmoko. Majalah ini dinilai terlalu keras mengkritik Habibie serta Soeharto ihwal pembelian kapal bekas dari Jerman Timur (Siregar dkk, 2018: 23).

Setelah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, sejak 6 Oktober 1998, majalah Tempo hadir kembali dengan tampil beda dan diterima masyarakat. Dengan mengedepankan peliputan berita yang jujur dan berimbang, serta tulisan yang disajikan dalam prosa yang menarik dan jenaka, menggunakan bahasa yang kritis dan diterima khalayak umum. Pada awalnya para pemrakarsa Tempo memang lebih memfokuskan Tempo pada sajian informasi yang akurat, faktual, terpercaya dan berimbang, dan pada akhirnya seiring dengan perkembangan zaman Tempo mampu berkembang dengan pesat dan menjadi perusahaan media nasional yang independen dan terpercaya di Indonesia (Hidayati, *skripsi*, 2018: 49).

Pada 6 Maret 1996, Tempo meluncurkan portal digital pertama di Indonesia, dengan nama Tempo Interaktif, Kala itu nama situsny masih

[www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com) sebelum akhirnya menjadi tempo.co pada tahun 2008. Karena beredar di dunia maya, majalah ini lolos dari jangkauan pembredelan (<https://korporat.tempo.co/tentang/timeline>, diakses 27 November 2019). Setelah hadir kembali majalah Tempo berada di bawah naungan PT Arsa Raya Perdana. Untuk meningkatkan skala dan kemampuan penetrasi ke bisnis dunia media, pada 2001, PT Arsa Raya Perdana melakukan *go public* dan mengubah namanya menjadi PT Tempo Inti Media Tbk (Perseroan) sebagai penerbit majalah Tempo yang baru. Dana dari hasil *go public* dipakai menerbitkan Koran Tempo yang berkompetisi di media harian. Pada 6 November 2000, Tempo menjadi media pertama yang masuk bursa saham dengan nama PT Tempo Inti Media Tbk (Siregar dkk, 2018: 23).

Tempo.co sebagai pionir portal berita sejak 1995 hadir menjawab kebutuhan sebagai media yang bisa dipercaya. Sejak 2008, Tempo.co telah lahir kembali dengan wajah baru dan sajian berita yang berkualitas. Tempo.co menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput peristiwa dan menuliskannya secara tajam, cerdas dan berimbang. Prinsip Tempo.co ialah enak dibaca dan perlu, bahkan jenaka pun bisa. Dengan slogan Tempo, yaitu “Untuk Publik, Untuk Republik”, Semua itu adalah upaya untuk membuat Indonesia lebih baik (<https://www.tempo.co/about>, diakses pada 27 november 2019).

Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia memaksa sejumlah pengusaha media untuk meningkatkan performa portal berita mereka. Salah satunya perusahaan Tempo Media Group dengan anak perusahaan digitalnya yakni Tempo.co. Seiring berkembangnya teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayak, Tempo memenuhi dengan membagi berita ke beberapa kanal yang bisa diakses melalui website Tempo.co (diakses 27 November 2019), antara lain : Kanal Nasional, Kanal Bisnis, Kanal Metr, Kanal Dunia, Kanal Bola, Kanal

Cantik, Kanal Tekno, Kanal Otomotif, Kanal Foto, Kanal Video, Kanal Investigasi, dan Kanal Kolom. Berdasarkan laporan tahunan PT Tempo Inti Media Tbk 2019 (Siregar dkk, 2018:19), jumlah pengunjung (*unique visitor*) Tempo.co naik 76%. Jumlah pengunjung yang tercatat sebanyak 25 juta per bulan pada 2017 menjadi 35 juta per bulan pada 2018. Jumlah halaman yang dibuka juga meningkat menjadi 115 juta per bulan. Tempo.co pada 2018 sudah meningkatkan jumlah produksi beritanya menjadi 360-400 berita per hari dan 12-15 video per hari.

Berdasarkan data Alexa.com, menunjukkan bahwa *traffic statistics* Tempo.co berada pada urutan 26 di Indonesia, sedangkan berdasarkan urutan global berada pada peringkat 616 dunia (<https://www.alexa.com/siteinfo/tempo.co> , diakses 29 November 2019).

#### 4.1.3.2 Visi dan Misi

Visi dan misi Tempo.co tercantum dalam Laporan Tahunan PT. Inti Media Tbk (Siregar dkk, 2018: 23), sebagai berikut :

##### 1. Visi

“Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. Budaya perusahaan adalah kebiasaan, prinsip, atau nilai yang diyakini sebagai pegangan dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi”.

##### 2. Misi

- a. Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.
- b. Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.

- c. Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia.
- d. Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.
- e. Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui peningkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.
- f. Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.

#### 4.1.3.3 Struktur Media

Berikut struktur Tempo online berdasarkan website tempo.co (<https://www.tempo.co/about>, diakses pada 27 november 2019) yang terdapat pada bagian redaksi :

**Nama Perusahaan** : PT INFO MEDIA DIGITAL

**Direktur Utama** : Toriq Hadad

**Direktur** : Burhan Sholihin, Y. Tomi Aryanto, Wahyu Dhyatmika

**Pemimpin Redaksi** : Setri Yasra

**Redaktur Eksekutif** : Anton Aprianto

**Koordinator Kanal Vertikal** : Elik Susanto

#### **Nasional Dan Hukum**

**Kepala** : Juli Hantoro

**Redaktur** : Jobpie Sugiharto, Endri Kurniawati, Syailendra Persada

**Staf Redaksi** : Amirullah, Friski Riana, Egy Adyatama

**Reporter** : Andita Rahma, Budiarti Utami Putri, Dewi Nurita, M. Rosseno  
Aji Nugroho

**Ekonomi Dan Bisnis**

Kepala : Rr Aryani Wdyastuti

Redaktur : Kodrat Setiawan, Dewi Rina Cahyani (Nonaktif)

Staf Redaksi : Ali Ahmad Noor Hidayat

Reporter: Caesar Akbar, Dias Prasongko, Fajar Febrianto, Muhammad

Hendratyo Hanggi, Francisca Christy Rosana

**Metro**

Kepala : Zakarias Wuragil

Redaktur : Tjandra Dewi, Dwi Arjanto

Staf Redaksi : Febriyan, Martha Warta Silaban

Reporter: Adam Prireza, Imam Hamdi, M Julnis Firmansyah, Lani Wijaya,

M. Yusuf Manurung

**Internasional**

Kepala : Maria Rita Ida Hasugian

Staf Redaksi : Budi Riza

**Gaya Hidup**

Kepala : Rini Kustiani

Redaktur : Istiqomatul Hayati

Staf Redaksi : Cheta Nilawaty, Mitra Tarigan, Mila Novita, Yunia Pratiwi

**Sains, Sport Dan Otomotif**

Kepala : Nurdin Saleh

Redaktur : Rina Widiastuti, Eko Ari Wibowo

Staf Redaksi : Erwin Z. Prima, Aditya Budiman, Wawan Priyanto

**Multimedia**

Kepala : Nana Riskhi Susanti

Fotografer : Amston Probel (Koordinator), Subekti  
Periset Foto : Charisma Adristy, Fardi Bestari, Nufus Nita  
Editor Video : Ngarto Februana (Koordinator), Ryan Maulana  
Videografer : Ridian Eka Saputra  
Produser Podcast : Dewa Made Erdy Kusuma

### **Medialab**

Kepala : Moerat Sitompul  
Staf Redaksi : Krisna Pradipta, Angelina Anjar Sawitri  
Desainer : Imam Riyadi, Rio Ari Seno, Riyan Rahmat

### **Pengembangan Audiens**

Manajer : Nita Azhar  
Analisis Data : Rahmawati  
Media Sosial : Ferdhinand Akbar (Koordinator), Abdur Rohim Latada, Bernadus  
Guntur

### **Teras.Id**

Redaktur Pelaksana : Yosep Suprayogi  
Redaktur : S. Dian Andryanto

### **Indonesiana**

Kepala : Gendur Sudarsono  
Redaktur Pelaksana : Tulus Wijanarko  
Pengembangan Komunitas : Rob Januar

### **Teknologi Informasi**

Kepala : Handy Dharmawan  
Koordinator : William Rince  
Programer : Birtha Arifudzaki, Abdul Rozaq Tri Novanto, Riky Susanto, Arif



Hidayat, Reza Pahlevi

Web Desainer : Sunardi

#### 4.1.3.4 Logo dan Tagline

Tempo.co tidak mencatumkan Tagline, akan tetapi ada nilai-nilai yang dimiliki oleh media Tempo yang menjadi keunggulan perusahaan selama perjalanan Tempo yaitu “Tepercaya, Merdeka, dan Profesional”. Tepercaya yaitu menjunjung tinggi integritas dalam setiap ucapan dan tindakan. Lalu merdeka artinya bebas mengekspresikan diri dengan menghargai keberagaman. Sedangkan profesional adalah selalu bekerja dengan standar kompetensi tertinggi (Siregar dkk, 2018: 23).

**Gambar 4.5 Tampilan Logo pada Halaman Utama Website**



Sumber : <https://www.tempo.co/>, diakses 02 Januari 2020.

**Gambar 4.6 Tampilan Logo pada Icon Website**



Sumber : <https://twitter.com/tempodotco>, diakses 02 Januari 2020.

#### 4.1.3.5 Alamat

Berdasarkan website Tempo.co (diakses 27 November 2019), alamat untuk Tempo online berada di **Jl. Palmerah Barat No. 8, Gedung Tempo, Jakarta Selatan 12210**. Adapun kontak person yang dapat dihubungi, ialah:

Telp: 62-21-5360409 / 7255625 / 5482132

Fax: 62-21-7206995

Email : [redaksi@tempo.co.id](mailto:redaksi@tempo.co.id) , [marketing@tempo.co.id](mailto:marketing@tempo.co.id)

#### **4.1.4 Kompas.com**

##### **4.1.4.1 Profil dan Sejarah Singkat**

Kompas.com adalah salah satu pionir media online di Indonesia ketika pertama kali hadir di Internet pada 14 September 1995 dengan pertama kali hadir di internet dengan domain [kompas.co.id](http://kompas.co.id) atau nama Kompas Online. Mulanya, Kompas Online atau KOL yang diakses dengan alamat [kompas.co.id](http://kompas.co.id) hanya menampilkan replika dari berita-berita harian Kompas yang terbit hari itu. Tujuannya adalah memberikan layanan kepada para pembaca harian Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Dengan hadirnya Kompas Online, para pembaca harian Kompas terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat menikmati harian Kompas hari itu juga, tidak perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya.

Selanjutnya, demi memberikan layanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat Kompas Online berubah menjadi [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Dengan alamat baru, Kompas Online menjadi semakin populer buat para pembaca setia harian Kompas di luar negeri. Melihat potensi dunia digital yang besar, Kompas Online kemudian dikembangkan menjadi sebuah unit bisnis tersendiri di bawah bendera PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak saat itu, Kompas Online lebih dikenal dengan sebutan KCM. Di era ini, para pengunjung KCM tidak lagi hanya mendapatkan replika harian Kompas, tapi juga mendapatkan update perkembangan berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari.

Pengunjung KCM meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya pengguna internet di Indonesia. Mengakses informasi dari internet kini telah menjadi bagian

tidak terpisahkan dari hidup kita sehari-hari. Dunia digital pun terus berubah dari waktu ke waktu. KCM pun berbenah diri. Pada 29 Mei 2008, portal berita ini *rebranding* dirinya menjadi Kompas.com, merujuk kembali pada brand Kompas yang selama ini dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberi makna. Kanal-kanal berita pun ditambah, diantara lain : terdapat Kanal News, Kanal Tre, Kanal Hype, Kanal Money, Kanal Bola, Kanal Tekno, Kanal Sains, Kanal Otomotif, Kanal Lifestyle, Kanal Prperti, Kanal Travel, Kanal Edukasi, Kanal JEO, Kanal Kolom, Kanal Images, dan Kanal VIK.

Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian informasi yang *update* dan aktual kepada para pembaca. *Rebranding* Kompas.com ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya. Pada 2018, Kompas.com hadir dengan tampilan, warna dan logo baru yang lebih solid (<https://inside.kompas.com/about-us>, diakses 27 November 2019). Berdasarkan data Alexa.com, menunjukkan bahwa *traffic statistics* Kompas.com berada pada urutan 6 di Indonesia, sedangkan berdasarkan urutan global berada pada peringkat 131 dunia (<https://www.alexa.com/siteinfo/kompas.com> , diakses 29 November 2019).

#### **4.1.4.2 Visi dan Misi**

Kompas.com yang dibawah langsung PT. Kompas Cyber Media dan dalam naungan Group Kompas Gramedia memiliki visi dan misi, “Menjadi Perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan, dan adil sejahtera” (<https://www.kompasgramedia.com/about-kg/vision-mission>, diakses 29 November 2019).

#### 4.1.4.3 Struktur Media

Berikut struktur Kompas online berdasarkan website Kompas.com (<https://inside.kompas.com/about-us>, diakses pada 27 november 2019) yang terdapat pada bagian editors :

**Nama Perusahaan** : **PT. Kompas Cyber Media**

**Editor in Chief** : Wisnu Nugroho

**Managing Editor** : Amir Sodikin

**Assistant Managing Editor** : Johanes Heru Margianto, Ana Shofiana Syatiri,  
Laksono Hari Wiwoho, Moh. Latip, Aris Fertonny  
Harvenda

**Editors** : Agustinus Wisnubrata, Sandro Gatra, Bayu Galih Wibisono, Sabrina Asril, Inggried Dwi Wedhaswary, Krisiandi, Icha Rastika, Egidius Patnistik, Kurnia Sari Aziza, Dian Maharani, Caroline Sondang Andhikayani Damanik, Reni Susanti, Farid Assifa, Erlangga Djumena, Ervan Hardoko, Glori Kyrious Wadrianto, Bambang Priyo Jatmiko, Aprillia Ika, Hilda Hastuti, Kistyarini, Taslimah Widiанти Kamil, Irfan Maullana, Aris Fertonny Harvenda, Agung Kurniawan, Azwar Ferdian, Lusia Kus Anna Maryati, Bestari Kumala Dewi, I Made Asdhiana, Shierine Wangsa Wibawa, Muhammad Reza Wahyudi, Reska Koko Nistanto, Aloysius Gonsaga AE, Jalu Wisnu Wirajati, Yunanto Wiji Utomo, Eris Eka Jaya, Palupi Annisa Auliani

**Reporters** : Fabian Januarius Kuwado, Ihsanuddin, Dani Prabowo, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Abba Gabrillin, Nabilla Tashandra, Kristian Erdianto, Rakhmat Nur Hakim, Robertus Belarminus, Alsadad Rudi, Jessi Carina, Andri Donnal Putera, Kahfi Dirga Cahya, Akhdi Martin Pratama, Nibras Nada Nailufar, David Oliver Purba, Nursita Sari, Yoga Sukmana, Sakina Rakhma Diah Setiawan,

Pramdia Arhando Julianto, Iwan Supriyatna, Achmad Fauzi, Arimbi Ramadhiani, Ridwan Aji Pitoko, Andi Muttya Keteng, Tri Susanto Setiawan, Dian Reinis Kumampung, Ira Gita Natalia Sembiring, Donny Apriliananda, Febri Ardani Saragih, Ghulam Muhammad Nayazri, Stanly Ravel Pattiwaelapia, Aditya Maullana, Setyo Adi Nugroho, Wahyu Adityo Prodjo, Sri Anindiati Nursastri, Silvita Agmasari, Anggita Muslimah, Oik Yusuf Araya, Yoga Hastyadi Widiartanto, Fatimah Kartini Bohang, Ferril Dennys Sitorus, Nugyasa Laksamana, Antonius Tjahjo Sasongko, Jodhi Yudono

**Photographers** : Roderick Adrian Mozes, Heribertus Kristianto Purnomo, Dino Oktaviano Sami Putra, Ari Prasetyo, Garry Andrew Lotulung, Andreas Lukas A., Lulu Cinantya

**Administrative & Secretary** : Adinda Dwi Putri, Ira Fauziah

**Content Marketing** : Josephus Primus, Sri Noviyanti, Mikhael Gewati, Erwin Kusuma Oloan Hutapea, Dimas Wahyu Trihardjanto

#### 4.1.4.4 Logo dan Tagline

Tagline Kompas online adalah “Jernih Melihat Dunia”. Dengan tagline tersebut, Kompas.com memposisikan sebagai media yang menyajikan informasi dalam perspektif yang objektif, utuh, independen, serta tidak bias oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan (<https://inside.kompas.com/about-us>, diakses pada 27 november 2019).

**Gambar 4.7 Tampilan Logo pada Halaman Utama Website**



Sumber : <https://www.kompas.com/>, diakses 02 Januari 2020.

### Gambar 4.8 Tampilan Logo pada Icon Website



Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas.com>, diakses 02 Januari 2020.

#### 4.1.4.5 Alamat

Berdasarkan website kompas.com (diakses 27 November 2019), alamat untuk kompas online berada di **Jl. Palmerah Selatan No. 22 – 28 Gedung Kompas Gramedia, Unit II Lt. 5 Jakarta 10270, Indonesia**. Adapun kontak person yang dapat dihubungi, ialah:

Telp : 62-21 53699200 / 5350377

Fax : 62-21 536067

#### 4.2 Gambaran Pemberitaan Isu Radikalisme Pada Media Online

Dari hasil pencarian yang telah dilakukan peneliti terkait pemberitaan isu radikalisme pada media online Republika.co.id, Voa-Islam.com, Tempo.co dan Kompas.com pada rentan waktu 23 Oktober sampai dengan 08 November 2019, ditemukan 44 berita dari Republika.co.id, 21 berita dari Voa-Islam.com, 9 berita dari Tempo.co, dan 9 berita dari Kompas.com. Setelah proses pencarian dan pengumpulan berita, peneliti mengelompokkan berita-berita tersebut ke dalam 5 isu yang akan analisis menggunakan elemen Robert N. Entman. Adapun 5 isu tersebut ialah pernyataan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama terkait radikalisme, pernyataan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait radikalisme, pernyataan Jokowi selaku Presiden terkait radikalisme, lalu tanggapan tokoh terhadap pernyataan pemerintah terkait radikalisme, serta tanggapan tokoh / ahli terhadap pernyataan Jokowi terkait radikalisme.

Menurut peneliti, pengambilan isu tersebut dianggap sesuai dengan latar belakang penelitian ini. Guna menjelaskan isu radikalisme di Indonesia, peneliti mengambil sudut pandang pemerintah yang dianggap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mengatasi masalah radikalisme yang ada di Indonesia. Hal ini jadi sorotan penting karena setelah pelantikan kabinet kerja jilid II Presiden Jokowi, pemerintah yang baru mengeluarkan tugas penting dan khusus kepada Menteri Agama untuk mengatasi radikalisme dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melakukan tindakan deradikalisasi. Atas tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menag dan Menkopolkam menjadi sebuah sorotan publik terhadap masalah radikalisme saat ini yang menjadi bahan sebuah pemberitaan bagi media. Alasan peneliti mengambil berita pernyataan Menag, Menkopolkam dan Presiden terkait radikalisme agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap arah masalah radikalisme di Indonesia yang dibingkai oleh media. Sedangkan, tanggapan tokoh / ahli terhadap pernyataan pemerintah terkait radikalisme itu sangat diperlukan, karena dapat melihat respon atas tindakan yang dilakukan pemerintah serta melihat media membingkai respon tersebut.

**Tabel 4.1 Tabel Pengelompokan Isu Berita**

No	Isu Berita	Republika	Voa-Islam	Tempo	Kompas
1	Pernyataan Fachrul Razi selaku Menag	4	1	4	1
2	Pernyataan Mahfud MD selaku Menkopolkam	4	-	1	1
3	Pernyataan Jokowi selaku Presiden	1	-	1	1
4	Tanggapan Tokoh terhadap Radikalisme	31	19	2	4
5	Tanggapan Tokoh/Ahli terhadap pernyataan Presiden	4	1	1	2
Jumlah		44	21	9	9

Sumber : Hasil pengelompokan Isu berita berdasarkan pengumpulan berita dari empat media.

Berdasarkan hasil pengelompokan isu diatas, peneliti menyeleksi masing-masing berita yang ada pada isu berita untuk dipilih satu berita. Penyeleksian berita ini diambil berdasarkan yang terkuat yang dianggap dapat mewakili dan menjelaskan isu tersebut. Setelah dipilih satu berita pada setiap isu, peneliti akan melakukan analisis framing pada masing-masing berita tersebut. Dari hasil pengelompokan diatas, berdasarkan seleksi isu menurut Entman yang menjelaskan bahwa penyeleksian isu digunakan untuk mengetahui bagaimana media memandang isu tersebut. Penyeleksian isu tersebut dapat menentukan penting tidaknya isu radikalisme bagi media tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah pemberitaan radikalisme pada masing-masing media. Banyak dan sedikit pemberitaan menunjukkan dalam media bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa keempat media peduli terhadap isu radikalisme dan dianggap penting untuk diberitakan.

#### **4.3 Analisis Framing Pemberitaan Radikalisme Pada Media Online**

Berdasarkan pada teori Robert N. Entman yang melihat framing dalam dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas suatu isu. Dalam prakteknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu yang akan diberitakan, dengan jumlah tertentu untuk diberitakan dan akan mengabaikan isu lain jika dianggap tidak penting. Sedangkan dalam menonjolkan aspek dari isu tersebut, media menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok, baik ditempatkan pada *headline* depan atau bagian belakang, pengulangan, penguatan data untuk mendukung dan memperkuat penekanan, pemakaian istilah kata tertentu, serta memudahkan aspek lain. Setelah menyeleksi isu dan menekankan aspek tertentu, media membuat frame judul berita yang menarik agar pembaca tertarik untuk membacanya.



Sebagaimana dalam konsep framing Entman, yang pada dasarnya merujuk pada identifikasi masalah dalam suatu peristiwa (*Problem Identification*), lalu menjelaskan apa yang menjadi sumber masalah itu muncul (*Causal Interpretation*), dan penilaian moral atas penyebab masalah untuk memperkuat argumentasi dari peristiwa tersebut (*Moral Evaluation*), serta menekankan pada rekomendasi penyelesaian masalah (*Treatment recommendation*).

#### 4.3.1 Republika.co.id

##### 1. Teks Berita Pernyataan Menteri Agama terhadap Radikalisme

Judul : Jadi Menag, Fachrul Siapkan Terobosan Hadapi Radikalisme

Sumber : Republika.co.id

Waktu : Rabu 23 Okt 2019 16:44 WIB

**Tabel 4.2 Analisis model Entman pada berita “Jadi Menag, Fachrul Siapkan Terobosan Hadapi Radikalisme”**

Elemen	Republika.co.id
<i>Problem Identification</i>	Fachrul Razi mengaku Presiden Jokowi memilihnya ia dianggap punya berbagai terobosan menghadapi radikalisme.
<i>Causal Interpretation</i>	Karena radikalisme yang akhir-akhir ini semakin banyak.
<i>Moral Evaluation</i>	Fachrul Razi mengatakan Islam merupakan agama yang mengajak pada persatuan dan mengokohkan NKRI. Ia pun menilai bahwa jalan-jalan kekerasan merupakan penafsiran yang salah atas Islam.
<i>Treatment Recommendation</i>	Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan sedang menyusun upaya-upaya yang dapat menangkal radikalisme yang muncul di Indonesia.

Sumber : <https://khazanah.republika.co.id/berita/pztn1u428/jadi-menag-fachrul-siapkan-terobosan-hadapi-radikalisme> , diakses 05 Desember 2019.

Berita pertama yang di analisis pada media Republika.co.id ialah dengan judul “Jadi Menag, Fachrul Siapkan Terobosan Hadapi Radikalisme”. Pada elemen *Problem Identification* (**pendefinisian masalah**) berita ini, bahwa Fachrul Razi mengaku alasan terpilihnya ia sebagai Menteri Agama dibandingkan kandidat lain atau

orang lain karena Presiden Jokowi menganggap ia mempunyai terobosan-terobosan untuk menangkai masalah radikalisme yang ada di Indonesia. Pada elemen ***Causal Interpretation*** (**memperkirakan penyebab masalah**) berita ini, karena menurut Fachrul Razi, Presiden Jokowi membayangkan belakangan ini adanya potensi-potensi radikalisme yang cukup kuat dan semakin banyak terjadi. Bahaya potensi ini yang menjadikan Fachrul Razi diberikan tugas untuk menangani masalah radikalisme karena dianggap mampu untuk menangkai paham radikalisme yang ada.

Sedangkan, elemen ***Moral Evaluation*** (**membuat pilihan moral**) pada berita ini, Fachrul Razi mengatakan bahwa ia sering memberikan khutbah kepada jamaahnya dengan ajakan kedamaian. Karena, menurutnya Islam merupakan agama yang penuh kedamaian dan penuh akan rahmat alam semesta ia pun menyampaikan bahwa Islam merupakan agama yang mengajak pada persatuan serta mengokohkan NKRI. Hal ini pun yang dapat memperkuat alasan Presiden Jokowi memilih Fachrul Razi sebagai Menteri Agama karena isi khutbahnya yang selalu mengajak pada kedamaian dan ia menilai jika ada terjadi bentuk atau ajakan dengan jalan-jalan kekerasan maka menurut dia ada yang salah dalam menafsirkan ajaran agama Islam. Secara implisit, Fachrul Razi mengatakan bahwa jika ada orang Islam yang melakukan jalan-jalan kekerasan dengan paham radikal maka ada yang salah dari dia dalam menafsirkan ajaran agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa penyebab marak radikalisme akhir-akhir ini karena ada sebagian orang Islam yang salah dalam menafsirkan ajaran agama Islam. Karena menurutnya bahwa ajaran agama Islam itu sudah jelas yaitu *rahmatan lil alamin*, jadi jika ada yang mengajak menjadi musuh apalagi sampai untuk membunuh banyak manusia pasti ada yang salah dari orang itu. Dan untuk ***Treatment Recommendation*** (**menekankan penyelesaian**) pada berita diatas, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menekankan penyelesaian dengan mengatakan

bahwa untuk menangani radikalisme di Indonesia, Fachrul Razi sebagai Menteri agama sedang menyusun upaya-upaya yang dapat menangkal radikalisme.

2. Teks Berita Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terhadap Radikalisme.

Judul : Mahfud: Pemerintah tak Pernah Katakan Umat Islam Radikal

Sumber : Republika.co.id

Waktu : Sabtu 02 Nov 2019 05:22 WIB

**Tabel 4.3 Analisis model Entman pada berita “Mahfud: Pemerintah tak Pernah Katakan Umat Islam Radikal”**

Elemen	Republika.co.id
<i><b>Problem Identification</b></i>	Mahfud MD, mengatakan, pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam sebagai kelompok radikal
<i><b>Causal Interpretation</b></i>	Karena adanya kelompok radikal yang ingin mengganti Pancasila serta Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sedangkan justru umat Islam tidak radikal itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik.
<i><b>Moral Evaluation</b></i>	Mahfud telah meminta masyarakat lebih jernih dalam melihat isu radikalisme agar tidak terlihat seolah-olah pemerintah memerangi kelompok tertentu saja. Ia pun menegaskan Muslim di Tanah Air pun menolak keberadaan paham radikal.
<i><b>Treatment Recommendation</b></i>	Mahfud menegaskan dalam menangani aksi terorisme pun, aparat tidak pernah memilih berdasarkan agama, apakah Islam atau bukan. Bagi pemerintah, setiap paham radikal harus ditekan apa pun agamanya.

Sumber : <https://nasional.republika.co.id/berita/q0ax3x335/mahfud-pemerintah-tak-never-katakan-umat-islam-radikal>, diakses 05 Desember 2019.

Berita kedua yang di analisis pada media Republika.co.id ialah dengan judul “Mahfud: Pemerintah tak Pernah Katakan Umat Islam Radikal”. Pada elemen ***Problem Identification (pendefinisian masalah)*** berita ini, bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu sebagai kelompok radikal. Terlihat dalam pernyataan tersebut, Mahfud MD sebagai Menkopolkam mewakili pemerintah untuk menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam itu sebagai

kelompok radikal. Dapat dikatakan jika ada orang yang menjabat atau berada di pemerintah berkata umat Islam itu radikal, maka dia berkata demikian bukan mewakili pemerintah melainkan dirinya sendiri.

Pada elemen *Causal Interpretation* (**memperkirakan penyebab masalah**) berita ini yang menjadi penyebabnya karena kelompok radikal merupakan kelompok yang ingin mengganti Pancasila serta Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah itu menganggap justru karena umat Islam tidak radikal itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik. Secara tersirat dalam berita ini Mahfud MD mengatakan bahwa selama umat Islam tidak radikal maka negara ini akan terjaga dengan baik, ia pun menyatakan bahwa memang ada kelompok radikal di Indonesia. Tapi menurut Mahfud, kelompok radikal ini tidak banyak dan bukanlah berasal dari umat Islam. Sedangkan kelompok radikal yang dianggap sebagai sumber permasalahan ini ingin mengganti Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 karena tidak cocok dengan paham kelompok ini, yang menganggap bahwa itu bentuk dari *thogut* atau menyembah selain Allah SWT serta termasuk bagian gerakan yang kafir.

Sedangkan, elemen *Moral Evaluation* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini dapat dilihat dari permintaan Mahfud MD agar masyarakat lebih jernih dalam melihat isu radikalisme agar tidak terlihat seolah-olah pemerintah sedang memerangi kelompok tertentu. Kelompok tertentu dimaksud ialah umat Islam, karena Mahfud menegaskan bahwa umat Islam di Tanah Air pun menolak keberadaan paham radikal. Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) pada berita diatas, bahwa Mahfud MD menegaskan dalam menangani kasus terorisme dan radikalisme, aparat dan pemerintah tidak

pernah memilih berdasarkan agama, baik itu Islam maupun bukan Islam, karena setiap paham radikal harus ditekan apa pun agamanya. Jika dalam penanganan kasus tersebut ternyata pelakunya beragama Islam maka bukan karena Islamnya. Dan juga Mahfud menjelaskan langkah apa yang akan dilakukannya dalam menanggulangi paham radikal, yaitu dengan melibatkan sistem pendidikan di Indonesia. Menurutnya, penekanan untuk tidak terlibat dalam radikalisme akan lebih banyak diselipkan dalam mata pelajaran di sekolah.

### 3. Teks Berita Pernyataan Presiden terhadap Radikalisme.

Judul : Jokowi Usul Radikalisme Bisa Diganti Jadi Manipulator Agama

Sumber : Republika.co.id

Waktu : Kamis 31 Okt 2019 16:02 WIB

**Tabel 4.4 Analisis model Entman pada berita “Jokowi Usul Radikalisme Bisa Diganti Jadi Manipulator Agama”**

Elemen	Republika.co.id
<b><i>Problem Identification</i></b>	Presiden Jokowi mengusulkan agar istilah radikalisme yang sering kali digunakan diganti menjadi istilah 'manipulator agama'.
<b><i>Causal Interpretation</i></b>	Karena kata radikalisme sekarang ini banyak disebut.
<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Presiden Jokowi menekankan, bahwa masalah radikalisme ini harus menjadi perhatian pemerintah.
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Presiden Jokowi kemudian menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar dapat mengoordinasikan masalah ini dengan jajaran menteri terkait.

Sumber : <https://republika.co.id/berita/q08efi377/jokowi-usul-radikalisme-bisa-diganti-jadi-manipulator-agama>, diakses 05 Desember 2019.

Berita ketiga yang di analisis pada media Republika.co.id ialah dengan judul “Jokowi Usul Radikalisme Bisa Diganti Jadi Manipulator Agama”. Pada elemen ***Problem Identification*** (pendefinisian masalah) berita ini, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar istilah radikalisme yang sering digunakan diganti dengan istilah manipulator agama. Menurut Presiden Jokowi istilah radikalisme sudah

sering digunakan di Indonesia, oleh karena itu ia mengusulkan untuk diganti istilah lain. Pengusulan pergantian istilah ini disampaikan pada rapat terbatas terkait program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Kamis (31/10). Pada elemen *Causal Interpretation* (**memperkirakan penyebab masalah**) ini yang menjadi penyebab presiden mengusulkan pergantian istilah karena kata radikalisme saat ini sudah banyak disebut oleh masyarakat dan menurut presiden untuk mencegah meluasnya makna radikalisme yang ada di masyarakat, Presiden Jokowi mengusulkan mengganti istilah radikalisme tersebut.

Sedangkan, elemen *Moral Evaluation* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini terlihat upaya Presiden Jokowi untuk menjadikan masalah radikalisme ini sebagai perhatian pemerintah dengan adanya upaya yang serius untuk mencegah meluasnya masalah radikalisme ini. Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) pada berita diatas Presiden menyerahkan masalah ini kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan jajaran menteri terkait untuk menangani lebih lanjut baik upaya yang dilakukan agar tidak meluas isu radikalisme tersebut. Tugas ini menjadi sinkron dengan penjelasan diatas terkait kapan usulan istilah ini disampaikan presiden, yaitu pada penyampaian program dan kegiatan di bidang, politik, hukum, dan keamanan yang secara jelas moment penyampaian dan usulan ini memang ditugaskan kepada Menkopolhukam.

#### 4. Teks Berita Tanggapan Tokoh terhadap Radikalisme.

Judul : Din: Jangan Tuduh Umat Islam Radikal dan Intoleran  
 Sumber : Republika.co.id  
 Waktu : Rabu 23 Okt 2019 22:00 WIB

**Tabel 4.5 Analisis model Entman pada berita “Din: Jangan Tuduh Umat Islam Radikal dan Intoleran”**

Elemen	Republika.co.id
<b>Problem Identification</b>	Prof Din Syamsuddin menyampaikan bahwa sebagian umat Islam merasa terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi.
<b>Causal Interpretation</b>	Karena tugas yang diberikan kepada Kemenag, menjadikan Kemenag berbelok anti radikalisme.
<b>Moral Evaluation</b>	Din menegaskan, kelompok dan paham yang anti Pancasila harus ditolak tapi tidak hanya paham yang bersifat keagamaan. Sebab banyak juga kelompok yang ingin mengembangkan paham-paham lain yang anti Pancasila.
<b>Treatment Recommendation</b>	Din mengingatkan, fungsi Kementerian Agama (Kemenag) untuk membangun moralitas bangsa dan mengembangkan keberagaman ke arah yang positif serta konstruktif bagi bangsa. Kemenag berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan serta kualitas keagamaan.

Sumber : <https://republika.co.id/berita/pzu0sz313/din-jangan-tuduh-umat-islam-radikal-dan-intoleran>, diakses 05 Desember 2019.

Berita keempat yang di analisis pada media Republika.co.id ialah dengan judul “Din: Jangan Tuduh Umat Islam Radikal dan Intoleran”. Pada elemen **Problem Identification (pendefinisian masalah)** ini yang jadi permasalahan menurut Prof Din Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan bahwa sebagian umat Islam merasa dituduh radikalisme dan intoleransi. Tuduhan tersebut dianggap menyakitkan bagi umat Islam. Padahal menurut Prof Din jika umat Islam tidak toleransi maka tidak akan ada stabilitas dan kerukunan yang terjalin di Indonesia. Sikap umat Islam yang toleransi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia ini. Dengan sebagai bukti kesultanan-kesultanan yang berjumlah 70-an ikhlas bergabung untuk mendukung dan berintergrasi dengan Negara Indonesia.

Pada elemen **Causal Interpretation (memperkirakan penyebab masalah)** penyebab dari masalah ini karena Prof Din memandang tugas yang diberikan kepada Kemenag, menjadikan Kemenag anti radikalisme. Menurut Din, tugas dalam menangani radikalisme yang di berikan kepada Kemenag membuat radikalisme itu sendiri hanya berasal dari umat yang beragama. Secara tidak langsung pemerintah menganggap radikalisme itu hanya berasal dari umat yang

beragama saja. Sedangkan, elemen *Moral Evaluation* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini dapat dilihat dengan pendapatnya Prof Din yang mengingatkan fungsi Kementerian Agama (Kemenag) itu untuk membangun moralitas bangsa dan mengembangkan keberagaman ke arah yang positif serta konstruktif bagi bangsa. Kemenag juga berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan serta kualitas keagamaan yang ada di Indonesia, jangan sampai malah berbelok arah.

Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) pada berita diatas, Prof Din menegaskan, apapun kelompok dan paham yang anti Pancasila harus ditolak. Akan tetapi menurutnya tidak hanya paham yang bersifat keagamaan saja yang dapat dikategorikan sebagai paham anti pancasila. Sebab di Indonesia masih banyak juga kelompok dan paham yang ingin mengembangkan paham-paham lain yang anti Pancasila, seperti paham Kapitalisme dan Liberalisme yang menjadi ancaman negara karena bertentangan dengan Pancasila. Din mengingatkan bahwa Kemenag boleh saja mengatasi perihal radikalisme yang ada, akan tetapi jangan hanya radikalisme bagian keagamaan saja karena masih banyak radikalisme yang dapat dipahami, seperti radikalisme terkait ekonomi dan politik.

##### 5. Teks Berita Tanggapan Ahli terhadap pernyataan disampaikan Presiden

Judul : Ahli: Sah Saja Ganti Radikalisme Jadi Manipulator Agama  
 Sumber : Antara.com  
 Waktu : Jumat 01 Nov 2019 14:41 WIB

**Tabel 4.6 Analisis model Entman pada berita “Ahli: Sah Saja Ganti Radikalisme Jadi Manipulator Agama”**



Elemen	Republika.co.id
<b><i>Problem Identification</i></b>	Ahli bahasa Sriyanto mengatakan sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo ingin mengganti kata 'radikalisme' menjadi 'manipulator agama'
<b><i>Causal Interpretation</i></b>	Karena Presiden tampaknya menangkap perkembangan makna radikalisme yang sangat luas atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat tertentu yang tidak mengenakan, lalu dicari istilah lain.
<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Sriyanto mengatakan penggunaan kata 'manipulator agama' mempunyai makna yang lebih mengerucut dan lebih jelas daripada pengertian radikalisme menurut yang beredar di masyarakat saat ini.
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	-

Sumber : <https://republika.co.id/berita/q0a5ch428/ahli-sah-saja-ganti-radikalisme-jadi-manipulator-agama>, diakses 05 Desember 2019.

Berita kelima yang di analisis pada media Republika.co.id ialah dengan judul “Ahli: Sah Saja Ganti Radikalisme Jadi Manipulator Agama”. Pada elemen ***Problem Identification (pendefinisian masalah)*** berita ini, bahwa menurut Ahli bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sriyanto mengatakan sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo ingin mengganti kata radikalisme menjadi manipulator agama. Sriyanto menanggapi atas wacana Presiden yang mengusulkan untuk mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama. Pada elemen ***Causal Interpretation (memperkirakan penyebab masalah)*** berita ini karena menurut Sriyanto , Presiden Jokowi tampaknya menangkap perkembangan makna radikalisme yang sangat luas atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat tertentu yang tidak mengenakan, lalu dicari istilah lain. Menurutnya presiden mengusulkan mengganti istilah karena untuk mencegah meluasnya paham radikalisme yang menjadi keresahan masyarakat Indonesia.

Sedangkan, elemen ***Moral Evaluation (membuat pilihan moral)*** pada berita ini menurut Sriyanto penggunaan kata manipulator agama mempunyai

makna yang lebih mengerucut dengan pergantian istilah diharapkan dapat memahami makna yang lebih jelas daripada pengertian radikalisme menurut yang beredar di masyarakat saat ini. Selama ini Sriyanto melihat pemberitaan media massa atau di media sosial (medsos) cenderung memaknai radikalisme dengan makna yang bias sehingga terkesan merujuk pada agama tertentu. Dan untuk ***Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian)*** pada berita diatas tidak ada. Republika.co.id tidak mencantumkan rekomendasi penyelesaian atas tanggapan terkait pernyataan Jokowi yang mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama.

Dari gambaran framing kelima berita diatas, dapat ditarik kesimpulan pemberitaan isu radikalisme di media online Republika.co.id yaitu menjelaskan bahwa Presiden Jokowi membayangkan belakangan ini adanya potensi-potensi radikalisme yang cukup kuat dan semakin marak terjadi. Pemerintah mengartikan bahwa radikalisme adalah kelompok yang ingin mengganti Pancasila serta Undang-Undang (UUD) 1945. Sedangkan Pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam itu sebagai kelompok radikal. Memang pemerintah mengakui ada kelompok radikal,akan tetapi bukanlah berasal dari umat Islam. Kelompok ini menganggap bahwa Pancasila dan UUD tidak cocok dengan paham kelompok mereka karena dianggap bentuk dari *thogut*.

Menurut pemerintah, Islam merupakan agama yang penuh kedamaian dan penuh akan rahmat alam semesta serta mengajak kepada persatuan dan mengokohkan NKRI. Salah jika ada orang Islam melakukan tindakan kekerasan yang mengarah kepada radikalisme. Karena, jika ada orang Islam yang radikal maka ada yang salah dalam menafsirkan ajaran agama Islam. Pemerintah sedang melakukan upaya-upaya untuk menangani masalah radikalisme oleh sebab itu pemerintah meminta agar

masyarakat lebih jernih dalam melihat isu radikalisme agar tidak terlihat seolah-olah pemerintah sedang memerangi umat Islam. Dalam menanggapi pernyataan pemerintah terhadap isu radikalisme, Din mengatakan bahwa radikalisme itu tidak hanya berasal dari paham keagamaan saja karena di Indonesia banyak juga yang ingin mengganti Pancasila seperti paham kapitalisme dan liberalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila. Serta radikalisme juga bisa berupa aspek ekonomi dan politik bukan hanya aspek agama saja.

Dari kesimpulan diatas berdasarkan 4 ciri dari paham radikalisme Republika.co.id mencantumkan satu ciri yaitu revolusioner, yang terlihat cenderung melakukan perubahan dengan tindakan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dalam pemberitaan pernyataan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama terhadap isu radikalisme “bahwa jalan-jalan kekerasan merupakan penafsiran yang salah dalam memahami ajaran Islam”.

#### 4.3.2 Voa-Islam.com

##### 1. Teks Berita Pernyataan Menteri Agama terhadap Radikalisme

Judul : Kata Menag, Radikal Itu Menjelek-jelekan Agama Lain dan Mengkafir-kafirkan

Sumber : Vivanews.com

Waktu : Kamis, 7 November 2019 08:36 wib

**Tabel 4.7 Analisis model Entman pada berita “Kata Menag, Radikal Itu Menjelek-jelekan Agama Lain dan Mengkafir-kafirkan”**

Elemen	Voa-Islam.com
<i>Problem Identification</i>	Fachrul Razi menegaskan, mereka yang menjelek-jelekan agama, serta mengkafirkan orang lain itu disebut radikal.
<i>Causal Interpretation</i>	Karena adanya fenomena tumbuhnya radikalisme berbasis agama belakangan ini.
<i>Moral Evaluation</i>	Menurut Fachrul Razi, radikalisme agama tentu saja tidak boleh dimaknai sebagai paham keberagamaan yang kuat dan

	mengakar, karena radikalisme semacam ini bukanlah sebuah ancaman.
<b>Treatment Recommendation</b>	Fachrul Razi bersama Kementerian Agama, dengan Ormas Islam, tokoh-tokoh agama, serta lembaga-lembaga keagamaan senantiasa bersinergi untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan paham-paham keagamaan yang bertentangan dengan prinsip moderasi (wasathiyah).

Sumber : <https://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2019/11/07/68250/kata-menag-radikal-itu-menjelek-jelekan-agama-lain-dan-mengkafirkafirkan/>, diakses 05 Desember 2019.

Berita pertama yang di analisis pada media Voa-Islam ialah dengan judul “Kata Menag, Radikal Itu Menjelek-jelekan Agama Lain dan Mengkafirkafirkan”. Pada elemen *Problem Identification* (**pendefinisian masalah**) berita ini, Fachrul Razi dalam memberikan sambutan kepada semua yang hadir dalam kegiatan “Kemah Pemuda Lintas Paham Keagamaan Islam” menegaskan, dalam aspek agama keyakinan bukanlah sebuah hal yang radikal melainkan mereka yang menjelek-jelekan agama, serta mengkafirkan orang lain itu disebut radikal. Dalam pernyataan tersebut Fachrul secara langsung mendeskripsikan siapa yang disebut sebagai orang yang radikal. Menurutnya orang yang mempunyai tingkat takwa yang tinggi tidak akan melakukan hal tersebut, dan orang yang telah menjelek-jelekan agama serta mengkafirkan orang lain itulah yang radikal. Fachrul melihat ini dari aspek agama bahwa radikal itu bukan soal keyakinan melainkan orangnya.

Pada elemen *Causal Interpretation* (**memperkirakan penyebab masalah**) berita ini, disebabkan adanya fenomena tumbuhnya radikalisme yang berbasis agama belakangan ini. Menurutnya fenomena ini merupakan problem yang penting dan secara khusus mendapatkan perhatian dari semua kalangan. Baik kalangan pemerintah maupun masyarakat secara umum. Sedangkan, elemen *Moral Evaluation* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini menurut Fachrul Razi, radikalisme yang membawa tendensi agama atau berbasis agama memiliki

dampak langsung pada kerukunan hidup intra dan antarumat beragama. Paham radikalisme agama ini tentu saja tidak boleh dimaknai sebagai paham keberagamaan yang kuat dan mengakar, karena radikalisme semacam ini bukanlah sebuah ancaman. Pemaknaan terhadap radikalisme ini perlu didefinisikan secara tegas, jelas, dan terukur jangan sampai terjadi penanganan yang keliru terhadap radikalisme. Kekeliruan yang dimaksud ialah dalam mendefinisikan radikalisme itu sendiri. Menurutnya, paham keberagamaan semacam ini perlu diarahkan kepada nilai-nilai yang lebih substansial, seperti penerimaan terhadap toleransi atas paham berbeda, menguatkan perdamaian, dan nilai-nilai lain yang substansial dari ajaran agama.

Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) pada berita diatas bahwa untuk menangani radikalisme, Fachrul Razi bersama Kementerian Agama, bersama dengan Ormas Islam, tokoh-tokoh agama, serta lembaga-lembaga keagamaan akan senantiasa bersinergi untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan paham-paham keagamaan yang bertentangan dengan prinsip moderasi (wasathiyah).

## 2. Teks Berita Tanggapan Tokoh terhadap Radikalisme

Judul : Din Syamsuddin: Tuduhan Radikal kepada Umat Islam Justru Dapat Kembangkan Radikalisme

Sumber : Voa-Islam.com

Waktu : Sabtu, 26 Oktober 2019 10:24 wib

**Tabel 4.8 Analisis model Entman pada berita “Din Syamsuddin: Tuduhan Radikal kepada Umat Islam Justru Dapat Kembangkan Radikalisme”**

Elemen	Voa-Islam.com
<b><i>Problem Identification</i></b>	Din Syamsuddin mengkritisi tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme.
<b><i>Causal Interpretation</i></b>	Karena menurut Din, tugas yang diberikan kepada Menag dalam mengatasi radikalisme sangat tendensius. Jika stigma radikal ini selalu diarahkan kepada kalangan Islam saja, maka itu justru dapat mengembangkan radikalisme.
<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Din menegaskan radikalisme memang harus ditolak terutama dalam bentuk tindakan nyata yang ingin memotong akar (radix) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi Presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana karena radikalisme tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bersifat politik dan ekonomi
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	-

Sumber : <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2019/10/26/68034/din-syamsuddin-tuduhan-radikal-kepada-umat-islam-justru-dapat-kembangkan-radikalisme/#sthash.H8G0bQvB.dpbs>, diakses 05 Desember 2019.

Berita kedua yang di analisis pada media Voa-Islam.com ialah dengan judul “Din Syamsuddin: Tuduhan Radikal kepada Umat Islam Justru Dapat Kembangkan Radikalisme”. Pada elemen ***Problem Identification*** (pendefinisian masalah) berita ini, menurut Din Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengkritisi tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme yang ada di Indonesia. Pada elemen ***Causal Interpretation*** (memperkirakan penyebab masalah) berita ini, penyebab Din mengkritisi tugas khusus tersebut karena tugas yang diberikan kepada Menag dalam mengatasi radikalisme sangat tendensius. Ia menilai jika stigma radikal ini selalu diarahkan kepada kalangan Islam saja, maka itu justru dapat mengembangkan radikalisme. Menurut Din yang sejatinya umat Islam tidak radikal bahkan yang mempunyai wawasan moderat akan tergerak membela mereka yang dianggap radikal jika diperlakukan tidak adil. Ia mengatakan umat Islam yang sejatinya tidak radikal bahkan berwawasan moderat sekalipun akan tergerak

membela mereka yang dianggap radikal jika diperlakukan tidak adil. Kebijakan dan tindakan anti-radikalisme demikian akan gagal dan akan dilawan karena dianggap sebagai bentuk radikalisme itu sendiri dan diyakini sebagai bentuk ketidakadilan atau kezaliman

Sedangkan, elemen *Moral Evalution* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini, Din menegaskan radikalisme memang harus ditolak terutama dalam bentuk tindakan nyata yang ingin memotong akar (*radix*) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi Presiden dan pemerintah saat ini dianggap tidak bersikap adil dan bijaksana dalam menangani radikalisme, karena pemerintah berfokus menangani radikalisme dalam lingkup keagamaan saja. Sedangkan, radikalisme itu tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bermotif politik dan ekonomi juga ada. Bahkan menurut Din ada sikap dan tindakan radikal terhadap negara Pancasila seperti komunisme (yang pernah dua kali memberontak) atau separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI tapi tidak dipandang sebagai musuh Negara Pancasila, hal inilah yang dipandang Din bahwa pemerintah tidak berlaku adil menempatkan radikalisme dibawah naungan Menteri Agama karena tugas ini sangat tendesius. Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) pada berita diatas tidak dicantumkan oleh media Voa-Islam.com.

### 3. Teks Berita Tanggapan Ahli terhadap pernyataan disampaikan Presiden

Judul : Siapa Lagi Manipulator Agama Itu?

Sumber : Voa-Islam.com, opini oleh Irma Setyawati, S.Pd.

Waktu : Sabtu, 2 November 2019 01:27 wib

**Tabel 4.9 Analisis model Entman pada berita “Siapa Lagi Manipulator Agama Itu?”**

Elemen	Voa-Islam.com
<b><i>Problem Identification</i></b>	Irma Setyawati mempertanyakan alasan mengapa istilah radikalisme diganti dengan manipulator agama, yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi.
<b><i>Causal Interpretation</i></b>	Karena menurut Irma, label manipulator agama ini tidak jauh-jauh dari label radikalisme yang tentunya akan disematkan kepada umat Islam. Sehingga istilah manipulator ini hanya sebagai narasi yang lebih lunak saja untuk menyebutkan radikalisme.
<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Menurut Irma, masyarakat sudah mulai sadar bahwa istilah radikalisme ini sasaran tembaknya adalah umat Islam. Sehingga, pemerintah saat ini sangat kebingungan menghambat laju kebangkitan umat Islam.
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Irma meminta pemerintah untuk akhiri drama perang melawan terorisme, radikalisme atau manipulator agama. Itu hanya akan menambah keresahan dan keterpecahan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah fokus saja saat ini pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Sumber : <https://www.voa-islam.com/read/citizens-journalism/2019/11/02/68159/siapa-lagi-manipulator-agama-itu/>, diakses 05 Desember 2019.

Berita ketiga yang di analisis pada media Voa-Islam.com ialah dengan judul “Siapa Lagi Manipulator Agama Itu?”. Pada elemen ***Problem Identification*** (**pendefinisian masalah**) berita ini, Irma Setyawati membuat opinion news ke Voa-Islam.com yang mempertanyakan wacana penggantian kata radikalisme dengan manipulator agama yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Pada elemen ***Causal Interpretation*** (**memperkirakan penyebab masalah**) berita ini penyebab karena menurut Irma, label manipulator agama ini tidak jauh-jauh dari label radikalisme yang tentunya akan disematkan kepada umat Islam. Sehingga istilah manipulator ini hanya sebagai narasi yang lebih lunak saja untuk menyebutkan radikalisme.

Bagi Irma seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan cap manipulator agama kepada umat Islam yang telah melakukan amar ma’ruf terhadap penguasa yang telah melakukan tindakan kedzaliman. Karena, menurut Irma sejatinya istilah manipulator agama itu digunakan kepada orang-orang yang memakai



agama sebagai alat untuk memuluskan kepentingan pribadinya dan hawa nafsu mereka saja. Dan tidaklah yang lebih pas dicap sebagai manipulator agama adalah mereka yang selama ini melakukan kampanye untuk dipilih sebagai pemimpin yang merangkul ulama dan umat Islam untuk mendulang suaranya, sedangkan ketika jadi suara umat Islam tidak di dengar lagi. Bukankah istilah manipulator agama juga mereka yang menggunakan dana-dana umat Islam untuk kepentingan pribadi, semisal dana zakat dan haji dan untuk membiayai proyek infrastruktur.

Sedangkan, elemen *Moral Evalution* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini menurut Irma, masyarakat sudah mulai sadar bahwa istilah radikalisme ini sasaran tembaknya adalah umat Islam. Sehingga, pemerintah saat ini sangat kebingungan menghambat laju kebangkitan umat Islam. Oleh sebab itulah dicari narasi baru untuk memberikan cap bagi mereka yang menentang kebijakan pemerintah. Karena lawan pemerintah saat ini tinggal umat Islam yang terus mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga pemerintah merasa tidak bisa leluasa mengeluarkan kebijakannya yang zalim. Sekarang ini hanya umat Islam dan Islam lah yang mengajarkan perlunya amar ma'ruf nahi munkar dalam berbangsa dan bernegara, terutama kepada penguasa. Sedangkan bagi pemerintah sekarang ini ajaran agama diluar Islam, tidak ada yang membahayakan pemerintah karena di dalam agamanya tidak pernah di ajarkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kebijakan-kebijakan dzalim penguasa yang ada.

Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) pada berita diatas, yaitu pernyataan Irma meminta pemerintah untuk menyuudahi atau mengakhiri drama perang melawan terorisme, radikalisme atau manipulator agama. Baginya itu hanya akan menambah keresahan dan keterpecahan di tengah-

tengah masyarakat. Pemerintah itu fokus saja saat ini pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Dari gambaran framing ketiga berita diatas, dapat ditarik kesimpulan pemberitaan isu radikalisme di media online Voa-Islam.com yaitu pemerintah melihat fenomena tumbuhnya radikalisme yang berbasis agama belakangan ini. Fenomena ini merupakan problem yang penting dan secara khusus mendapatkan perhatian lebih dari semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat umum. Pemerintah juga melihat dalam aspek agama keyakinan bukanlah sebuah hal yang radikal. Melainkan mereka yang menjelek-jelekkkan agama, serta mengkafirkan orang lain itu disebut radikal. Radikalisme yang membawa tendensi agama atau berbasis agama dapat berdampak langsung pada kerukunan hidup intra dan antarumat beragama. Menurut Din yang sejatinya umat Islam tidak radikal bahkan yang mempunyai wawasan moderat akan tergerak membela mereka yang dianggap radikal jika diperlakukan tidak adil.

Din juga menegaskan radikalisme memang harus ditolak terutama dalam bentuk tindakan nyata yang ingin memotong akar (radix) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi Presiden dan pemerintah saat ini dianggap tidak bersikap adil dan bijaksana dalam menangani radikalisme, karena pemerintah berfokus menangani radikalisme dalam lingkup keagamaan saja. Sedangkan, radikalisme itu tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bermotif politik dan ekonomi juga ada. Bahkan menurut Din ada sikap dan tindakan radikal terhadap negara Pancasila seperti komunisme dan liberalism.

Menurut Irma, label manipulator agama ini tidak jauh-jauh dari label radikalisme yang tentunya akan disematkan kepada umat Islam. Sehingga istilah manipulator ini hanya sebagai narasi yang lebih lunak saja untuk menyebutkan

radikalisme. Irma meminta pemerintah untuk menyudahi atau mengakhiri drama perang melawan terorisme, radikalisme atau manipulator agama. Baginya itu hanya akan menambah keresahan dan keterpecahan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah itu fokus saja saat ini pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Dari kesimpulan diatas berdasarkan 4 ciri dari paham radikalisme Voa-Islam.com mencantumkan dua ciri yaitu intoleran yang tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain dan fanatik yang selalu merasa benar sendiri serta menganggap orang lain salah. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan pernyataan Fachrul Razi terhadap isu radikalisme, intoleran dapat dilihat dari perkataan bahwa “radikalisme yang membawa tendensi agama atau berbasis agama dapat berdampak langsung pada kerukunan hidup intra dan antarumat beragama” dan pada ciri fanatik dapat dilihat dari pernyataan yang mengatakan bahwa “Melainkan mereka yang menjelek-jelekan agama, serta mengkafirkan orang lain itu disebut radikal”.

### 4.3.3 Tempo.co

#### 1. Teks Berita Pernyataan Menteri Agama terhadap Radikalisme

Judul : Fachrul Razi Buka-bukaan Soal Radikalisme dan Ustad Provokatif

Sumber : Tempo.co

Waktu : Jumat, 1 Nov 2019 07:02 WIB

**Tabel 4.10 Analisis model Entman pada berita “Fachrul Razi Buka-bukaan Soal Radikalisme dan Ustad Provokatif”**

Elemen	Tempo.co
<i>Problem Identification</i>	Fachrul Razi mengartikan radikalisme adalah orang yang berpikir menyelesaikan ketidaksepahaman atau permasalahan dengan cara kekerasan.
<i>Causal Interpretation</i>	Karena adanya potensi radikalisme yang dapat menghancurkan bangsa.

<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Fachrul Razi menganggap kekerasan dalam bentuk apa pun itu radikal karena agama mengajarkan menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Untuk menangani masalah radikalisme, Fachrul Razi menajamkan program yang sudah ada dan memberikan tindakan cepat jika ada yang dinilai bisa memprovokasi ke arah radikalisme untuk langsung di coret.

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/1266865/fachrul-razi-buka-bukaan-soal-radikalisme-dan-ustad-provokatif> , diakses 05 Desember 2019.

Berita pertama yang di analisis pada media Tempo.co ialah dengan judul “Fachrul Razi Buka-bukaan Soal Radikalisme dan Ustad Provokatif”. Pada elemen ***Problem Identification (pendefinisian masalah)*** berita ini, Fachrul Razi saat di wawancara oleh Tempo.co terkait apa definisi radikalisme menurut pemahamannya, beliau menafsirkan radikalisme itu adalah orang yang berpikir menyelesaikan ketidaksepahaman atau permasalahan dengan cara kekerasan. Dari sini bisa diambil pandangan Fachrul Razi selaku Menteri Agama bahwa radikalisme itu pelaku (orang) yang mempunyai pikiran dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau segala bentuk ketidaksepahaman terhadap pendapatnya dengan melakukan cara-cara kekerasan disebut radikalisme.

Pada elemen ***Causal Interpretation (memperkirakan penyebab masalah)*** berita ini yang menjadi penyebabnya karena adanya potensi radikalisme yang menghancurkan bangsa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai pesan Presiden Jokowi kepada Fachrul Razi ketika ditunjuk untuk menangani paham radikalisme. Presiden berpesan agar mewaspadaai masalah radikalisme yang dapat menghancurkan bangsa. Dapat diartikan bahwa dari awal sendiri Presiden Jokowi sendiri memandang potensi bahayanya radikalisme yang dapat menghancurkan Indonesia.

Sedangkan, elemen ***Moral Evaluation (membuat pilihan moral)*** pada berita ini Fachrul Razi menganggap kekerasan dalam bentuk apa pun itu disebut radikal

karena menurutnya agama mengajarkan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Maka jika ada orang yang membawa bendera Islam tapi berbicara radikal lalu main hantam, main butuh, ya itu bukan ajaran Rasulullah. Dalam penegasan yang menjadi evaluasi moral atau penguat argumentasi dari pernyataan definisi radikalisme itu bahwa Fachrul Razi menunjuk contoh radikal itu orang Islam yang membawa bendera Islam lalu berbicara radikal sambil main hantam dan main bunuh. Disini dapat dilihat bahwa Menteri Agama Fachrul Razi mengarahkan radikalisme kepada umat Islam sebab yang dijadikan contoh adalah umat Islam.

Dan untuk *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian) pada berita diatas, dalam menangani masalah radikalisme, Fachrul Razi telah menajamkan program yang sudah ada sebelumnya dan memberikan tindakan dan langkah-langkah cepat jika ada yang dinilai dapat memprovokasi ke arah radikalisme untuk langsung di coret.

## 2. Teks Berita Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan terhadap Radikalisme.

Judul : Mahfud MD: Pemerintah Tak Pernah Mengatakan Umat Islam  
Radikal

Sumber : Tempo.co

Waktu : Kamis, 31 Okt 2019 19:42 WIB

**Tabel 4.11 Analisis model Entman pada berita “Mahfud MD: Pemerintah Tak Pernah Mengatakan Umat Islam Radikal”**

Elemen	Tempo.co
<i>Problem Identification</i>	Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal.
<i>Causal Interpretation</i>	Karena radikalisme itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan. Jadi salah mengatakan jika hanya orang Islam didiskriminasi dengan tuduhan radikal.

<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Mahfud meminta agar masyarakat tidak mendramatisir bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu.
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Mahfud mengatakan bahwa Pemerintah dalam menangani orang-orang berpaham radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak. Jika kebetulan ada yang Islam, pelaku ditindak karena radikalnya, bukan karena agamanya.

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/1266857/mahfud-md-pemerintah-tak-pernah-mengatakan-umat-islam-radikal>, diakses 05 Desember 2019.

Berita kedua yang di analisis pada media Tempo.co ialah dengan judul “Mahfud MD: Pemerintah Tak Pernah Mengatakan Umat Islam Radikal”. Pada elemen ***Problem Identification*** (**pendefinisian masalah**) berita ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal. Mahfud MD mewakili pemerintah memberikan pernyataan bahwa tidak pernah pemerintah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal yang dimaksud pemerintah dalam menangani masalah radikalisme di Indonesia. *Statement* ini diungkapkan sebagai penegasan kepada orang yang mempunyai dugaan bahwa pemerintah Indonesia menganggap bahwa umat Islam itu biangnya Radikal. Pada elemen ***Causal Interpretation*** (**memperkirakan penyebab masalah**) yang menjadi penyebab atau landasan Mahfud mengatakan ini karena pendapatnya radikalisme itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan. Juga mahfud menambahkan radikalisme itu mereka yang merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak muda punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi seperti yang dilakukan pemerintah ini adalah salah. Jadi salah mengatakan jika hanya orang Islam didiskriminasi dengan tuduhan radikal. Karena, yang dimaksud radikalisme oleh pemerintah yang mempunyai paham seperti itu bukan umat Islam yang ditargetkan.

Sedangkan, elemen ***Moral Evaluation*** (**membuat pilihan moral**) pada berita ini Mahfud meminta agar masyarakat tidak mendramatisir bahwa gerakan

deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu. Menurut Mahfud memang ada faktanya bahwa ada kelompok-kelompok kecil yang radikal. Kelompok yang dimaksud ini adalah umat Islam, Mahfud mengatakan demikian agar masyarakat memahami arah bidik dari gerakan deradikalisasi oleh pemerintah. Dan untuk ***Treatment Recommendation*** (**menekankan penyelesaian**) pada berita tersebut ialah Mahfud mengatakan bahwa Pemerintah dalam menangani orang-orang berpaham radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak. Jika kebetulan ada yang Islam, pelaku ditindak karena radikalnya, bukan karena agamanya. Jadi disini Mahfud menekankan ke masyarakat jangan menilai agamanya ketika pemerintah memberikan dugaan bahwa jika ada orang radikal.

### 3. Teks Berita Pernyataann Presiden terhadap Radikalisme.

Judul : Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama

Sumber : Tempo.co

Waktu : Kamis, 31 Okt 2019 14:57 WIB

**Tabel 4.12 Analisis model Entman pada berita “Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama”**

Elemen	Tempo.co
<b><i>Problem Identification</i></b>	Presiden Jokowi sempat melontarkan wacana menggunakan istilah lain untuk mengganti kata radikalisme dengan manipulator agama
<b><i>Causal Interpretation</i></b>	Karena untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia.
<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Radikalisme menjadi salah satu isu yang disorot oleh Presiden Jokowi. Ia memberi pesan khusus terkait hal ini saat memanggil para calon menteri satu per satu beberapa waktu lalu.
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menangani paham – paham radikalisme dengan mengkoordinir menteri-menteri terkait.

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/1266715/jokowi-usul-ganti-istilah-radikalisme-jadi-manipulator-agama>, diakses 05 Desember 2019.

Berita ketiga yang di analisis pada media Tempo.co ialah dengan judul “Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama”. Pada elemen ***Problem Identification*** (pendefinisian masalah) berita ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat melontarkan wacana menggunakan istilah lain untuk mengganti kata radikalisme dengan manipulator agama. Wacana itu dilontarkan Presiden kepada audience yang hadir di rapat terbatas penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, yang mengatakan “Enggak tahu. Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama”. Pada elemen ***Causal Interpretation*** (memperkirakan penyebab masalah) yang menjadi penyebab Presiden menyampaikan wacana tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia dengan mengganti istilah radikalisme dengan istilah yang lain.

Sedangkan, elemen ***Moral Evaluation*** (membuat pilihan moral) pada berita ini bahwa radikalisme menjadi salah satu isu yang disorot oleh Presiden Jokowi. Ia memberi pesan khusus terkait hal ini saat memanggil para calon menteri satu per satu beberapa waktu lalu. Presiden telah membidik isu radikalisme ini menjadi fokus penyelesaian agar tidak meluas lagi. Dan untuk ***Treatment Recommendation*** (menekankan penyelesaian) pada berita ini Tempo.co menerangkan bahwa masalah wacana pergantian istilah ini, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menangani paham – paham radikalisme dengan mengkoordinir menteri-menteri terkait. Hal ini disampaikan saat Presiden memberikan pengantar rapat terbatas tersebut.

#### 4. Teks Berita Tanggapan Tokoh terhadap Radikalisme

Judul : Romo Magnis: Radikalisme Tidak Akan Mengambil Alih Negara  
Ini



Sumber : Tempo.co

Waktu : Rabu, 30 Okt 2019 18:12 WIB

**Tabel 4.13 Analisis model Entman pada berita “Romo Magnis: Radikalisme Tidak Akan Mengambil Alih Negara Ini”**

Elemen	Tempo.co
<b><i>Problem Identification</i></b>	Romo Franz Magnis Suseno menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi
<b><i>Causal Interpretation</i></b>	Karena menurut Franz akar dari radikalisme ialah kemiskinan dan pemberantasan korupsi ialah cara untuk mengurangi kemiskinan itu.
<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Menurut Franz lemahnya pemberantasan korupsi hanya akan menguntungkan segelintir kelas elite politik. Hal itu akan memperlebar ketimpangan ekonomi di masyarakat yang menjadi cikal bakal tumbuhnya radikalisme.
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Franz mengatakan radikalisme tidak akan mengambil alih negara jika Presiden Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/1266329/romo-magnis-radikalisme-tidak-akan-mengambil-alih-negara-ini>, diakses 05 Desember 2019.

Berita yang keempat di analisis pada media Tempo.co ialah dengan judul “Romo Magnis: Radikalisme Tidak Akan Mengambil Alih Negara Ini”. Pada elemen ***Problem Identification*** (**pendefinisian masalah**) berita ini, Tokoh Katolik Romo Franz Magnis Suseno menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan karena salah satu agenda prioritas Presiden Jokowi di masa kedua pemerintahannya ialah melawan radikalisme. Penekanan terkait radikalisme itu terlihat dari penunjukan menteri yang menduduki kementerian di bidang politik, hukum dan keamanan. Pada elemen ***Causal Interpretation*** (**memperkirakan penyebab masalah**) yang dilihat dari penyebabnya karena menurut Franz akar dari radikalisme ialah kemiskinan dan pemberantasan korupsi ialah cara untuk mengurangi kemiskinan itu. Ia berpendapat juga kalau mau Indonesia bisa maju,

serta kalau orang kecil merasa bisa maju, itu bisa mengandaikan Indonesia tidak ada korupsi.

Sedangkan, elemen *Moral Evalution* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini menurut Franz lemahnya pemberantasan korupsi hanya akan menguntungkan segelintir kelas elite politik. Hal itu akan memperlebar ketimpangan ekonomi di masyarakat yang menjadi cikal bakal tumbuhnya radikalisme. Dalam hal ini Franz mengibaratkan kondisi Indonesia saat ini dengan istilah took Swalayan, “Kalau masyarakat mendapat pesan bahwa kita hidup di dalam semacam toko swalayan di mana kelas politik melayani diri sendiri, maka tekanan ke arah perubahan radikal yang tidak kita kehendaki itu ada, saya anggap itu serius”. Ia masih berharap Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perpu KPK tersebut. Karena dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menyatakan akan menimbang untuk menerbitkan perpu. Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) pada berita diatas, Franz mengatakan radikalisme tidak akan mengambil alih negara jika Presiden Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan penerbitan Perpu itu bisa mengembalikan fungsi KPK seperti sebelum revisi UU.

##### 5. Teks Berita Tanggapan Ahli terhadap pernyataan disampaikan Presiden

Judul : Kata Wamen Agama Soal Ide Radikalisme Jadi Manipulator  
Agama

Sumber : Tempo.co

Waktu : Minggu, 3 Nov 2019 08:57 WIB

**Tabel 4.14 Analisis model Entman pada berita “Kata Wamen Agama Soal Ide Radikalisme Jadi Manipulator Agama”**

Elemen	Tempo.co
<b>Problem Identification</b>	Zainut Tauhid angkat bicara soal wacana Presiden Jokowi yang akan menggunakan istilah manipulator agama untuk mengganti radikalisme.
<b>Causal Interpretation</b>	Karena pelabelan istilah baru itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah meluasnya gerakan radikalisme.
<b>Moral Evaluation</b>	Menurut Zainut yang harus dipahami adalah semangat bapak presiden untuk memahami agama. Lalu maksud presiden menyebut frasa 'manipulator agama' mungkin bisa menjadi pengganti dari gerakan radikalisme.
<b>Treatment Recommendation</b>	Zainut memberikan nama lain yakni perusuh agama.

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/1267702/kata-wamen-agama-soal-ide-radikalisme-jadi-manipulator-agama>, diakses 05 Desember 2019.

Berita yang di analisis pada media ialah dengan judul “”. Pada elemen **Problem Identification (pendefinisian masalah)** berita ini, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid angkat bicara soal wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menggunakan istilah manipulator agama untuk mengganti radikalisme. Pada elemen **Causal Interpretation (memperkirakan penyebab masalah)** yang menjadi penyebab karena pelabelan istilah baru untuk radikalisme itu yang diutarakan Jokowi sebagai salah satu upaya yang serius untuk mencegah meluasnya gerakan tersebut.

Sedangkan, elemen **Moral Evaluation (membuat pilihan moral)** pada berita ini Menurut Zainut yang harus dipahami adalah bukan masalah pergantian istilahnya melainkan semangat bapak presiden untuk memahami agama. Lalu maksud presiden menyebut frasa 'manipulator agama' mungkin bisa menjadi pengganti dari gerakan radikalisme yang telah disebut-sebut akhir-akhir ini di masyarakat Indonesia. Dan untuk **Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian)** pada berita ini, Zainut memberikan rekomendasi nama lain untuk mengganti istilah radikalisme dengan perusuh agama. Menurutnya apapun istilahnya, apakah itu manipulator agama atau perusuh agama, perusuh dapat

diartikan sebagai orang yang menciptakan situasi yang bisa menceraikan-beraikan bangsa Indonesia, itu harus kita tolak bersama.

Dari gambaran framing kelima berita diatas, dapat ditarik kesimpulan pemberitaan isu radikalisme di media online Tempo.co yaitu radikalisme diartikan oleh pemerintah sebagai orang yang berpikir menyelesaikan ketidaksepahaman atau permasalahan dengan cara kekerasan. Karena segala bentuk kekerasan dalam bentuk apa pun itu disebut radikal. Pemerintah memandang agama mengajarkan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Jadi aneh jika umat beragama menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan ketidaksepahaman terhadap orang yang berbeda paham. Pemerintah mewaspadai masalah radikalisme yang mempunyai potensi untuk menghancurkan bangsa Indonesia.

Tapi pemerintah menegaskan bahwa tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Menurut pemerintah paham radikal itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi Negara dengan cara melawan aturan dengan jalan-jalan kekerasan. Serta mereka yang merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak muda punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi seperti yang dilakukan pemerintah salah. Menurut Franz, tokoh agama katolik mengatakan bahwa lemahnya pemberantasan korupsi hanya akan menguntungkan segelintir kelas elite politik. Hal itu akan memperlebar ketimpangan ekonomi di masyarakat yang menjadi cikal bakal tumbuhnya radikalisme.

Dari kesimpulan diatas berdasarkan 4 ciri dari paham radikalisme Tempo.co mencantumkan satu ciri yaitu revolusioner yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan diatas yang mengatakan “paham radikal itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi Negara dengan cara melawan aturan dengan jalan-jalan kekerasan”

#### 4.3.4 Kompas.com

##### 1. Teks Berita Pernyataan Menteri Agama terhadap Radikalisme

Judul : Jadi Menteri Agama, Fachrul Razi Siap Lawan Radikalisme

Sumber : Kompas.com

Waktu : Senin, 23 Okt 2019 17:10 WIB

**Tabel 4.15 Analisis model Entman pada berita “Jadi Menteri Agama, Fachrul Razi Siap Lawan Radikalisme”**

Elemen	Kompas.com
<i>Problem Identification</i>	Fachrul Razi mengaku siap untuk melawan radikalisme.
<i>Causal Interpretation</i>	Karena adanya potensi-potensi radikalisme yang menguat belakangan ini.
<i>Moral Evaluation</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Untuk menangani masalah radikalisme, Fachrul Razi saat ini akan mempelajari dan menganalisa situasi terlebih dulu.

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/17100701/jadi-menteri-agama-fachrul-razi-siap-lawan-radikalisme>, diakses 05 Desember 2019.

Berita yang pertama di analisis pada media Kompas.com ialah dengan judul “Jadi Menteri Agama, Fachrul Razi Siap Lawan Radikalisme”. Pada elemen *Problem Identification* (**pendefinisian masalah**) berita ini, Jenderal (purn) Fachrul Razi mengaku siap untuk melawan radikalisme. Hal ini disampaikan Fachrul usai dilantik sebagai Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo. Pada elemen *Causal Interpretation* (**memperkirakan penyebab masalah**) yang menjadi penyebab berita ini penyebab Fachrul siap melawan radikalisme karena adanya potensi-potensi radikalisme yang menguat di Indonesia belakangan ini. Sedangkan, elemen *Moral Evaluation* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini tidak ada, dengan kata lain Kompas.co tidak memberikan evaluasi moral dalam menguatkan argumentasi dari pendefinisian masalah. Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) pada berita ini Kompas.com menjelaskan untuk menangani masalah radikalisme, Fachrul Razi yang telah dilantik sebagai Menteri Agama saat ini akan

mempelajari dan menganalisa situasi terlebih dulu sebelum mengeluarkan pernyataan arah tindakan kerja. Hal ini disebabkan karena Fachrul Razi percaya diri ia dipilih Presiden Jokowi karena diyakini bisa melawab radikalisme di Indonesia.

2. Teks Berita Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terhadap Radikalisme.

Judul : Mahfud MD: Pemerintah Tangani Radikalisme, Tak Peduli Islam atau Bukan

Sumber : Kompas.com

Waktu : Selasa, 31 Okt 2019 21:57 WIB

**Tabel 4.16 Analisis model Entman pada berita “Mahfud MD: Pemerintah Tangani Radikalisme, Tak Peduli Islam atau Bukan”**

Elemen	Kompas.com
<i><b>Problem Identification</b></i>	Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal.
<i><b>Causal Interpretation</b></i>	Karena radikalisme itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan. Jadi salah mengatakan jika hanya orang Islam didiskriminasi dengan tuduhan radikal, sebab baik orang Islam atau bukan, jika melakukan hal itu maka disebut radikal.
<i><b>Moral Evaluation</b></i>	Mahfud meminta agar masyarakat tidak mendramatisasi bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu.
<i><b>Treatment Recommendation</b></i>	Mahfud memastikan pemerintah menindak radikalisme tanpa melihat dari agamanya, tidak peduli Islam atau tidak.

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/31/21575001/mahfud-md-pemerintah-tangani-radikalisme-tak-peduli-islam-atau-bukan>, diakses 05 Desember 2019.

Berita yang kedua di analisis pada media Kompas.com ialah dengan judul “Mahfud MD: Pemerintah Tangani Radikalisme, Tak Peduli Islam atau Bukan”.

Pada elemen ***Problem Identification (pendefinisian masalah)*** berita ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal. Dalam hal ini Mahfud MD berbicara mewakili pemerintah untuk menegaskan bahwa pemerintah

Indonesia tidak pernah mengatakan atau mengarahkan statement radikal itu ke umat Islam. Pada elemen *Causal Interpretation* (**memperkirakan penyebab masalah**) yang menjadi penyebab Mahfud MD mengatakan hal tersebut karena menurut dia radikalisme yang berdasarkan versi pemerintah yaitu itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan. Jadi salah jika mengatakan hanya orang Islam saja yang didiskriminasi dengan tuduhan radikal, sebab baik orang Islam atau bukan, jika melakukan hal itu maka disebut radikal. Juga Mahfud menambahkan bahwa radikalisme juga yang merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi adalah salah.

Sedangkan, elemen *Moral Evaluation* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini Mahfud meminta agar masyarakat tidak mendramatisasi bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu. Mahfud juga mengatakan bahwa faktanya memang ada kelompok-kelompok kecil yang radikal. Kelompok yang dimaksud Mahfud yaitu umat Islam, sedangkan kelompok kecil ini diarahkan kepada kelompok aliran yang ada di Islam, yang memandang dengan cara yang berbeda tapi beragama Islam. Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) pada yang dijadikan solusi dalam masalah ini Mahfud memastikan bahwa pemerintah dalam menindak radikalisme tanpa melihat dari agamanya, tidak peduli Islam atau tidak.

### 3. Teks Berita Pernyataann Presiden terhadap Radikalisme.

Judul : Jokowi Ingin Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama

Sumber : Kompas.com

Waktu : Selasa, 31 Okt 2019 15:07 WIB

**Tabel 4.17 Analisis model Entman pada berita “Jokowi Ingin Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama”**

Elemen	Kompas.com
<b>Problem Identification</b>	Presiden Joko Widodo ingin agar istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama.
<b>Causal Interpretation</b>	Karena menurut Jokowi harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya radikalisme ini dengan cara mencari istilah lain untuk menyebut orang-orang yang dianggap radikal
<b>Moral Evaluation</b>	-
<b>Treatment Recommendation</b>	Presiden Jokowi menyerahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/31/15075141/jokowi-ingin-istilah-radikalisme-diganti-jadi-manipulator-agama>, diakses 05 Desember 2019.

Berita yang ketiga di analisis pada media Kompas.com ialah dengan judul “Jokowi Ingin Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama”. Pada elemen **Problem Identification (pendefinisian masalah)** berita ini, Presiden Joko Widodo ingin agar istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden. Pada elemen **Causal Interpretation (memperkirakan penyebab masalah)** yang menjadi penyebab Presiden Jokowi mengusulkan istilah lain karena menurut Presiden Jokowi harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya radikalisme ini. Upaya tersebut dengan cara mencari istilah lain untuk menyebut orang-orang yang dianggap radikal.

Sedangkan, elemen **Moral Evaluation (membuat pilihan moral)** pada berita ini tidak ada. Kompas.com tidak mencantumkan argumentasi atas penyebab masalah dan menguatkan dari pendefinisian masalah. Dan untuk **Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian)** pada penyelesaian yang diberikan yaitu Presiden Jokowi menyerahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah radikalisme dan pergantian istilah tersebut.

#### 4. Teks Berita Tanggapan Tokoh terhadap Radikalisme

Judul : PKS Minta Menag Tak Terjebak Simbol dalam Atasi Radikalisme



Sumber : Kompas.com

Waktu : Kamis, 02 Nov 2019 20:38 WIB

**Tabel 4.18 Analisis model Entman pada berita “PKS Minta Menag Tak Terjebak Simbol dalam Atasi Radikalisme”**

Elemen	Kompas.com
<i><b>Problem Identification</b></i>	Fathul Bari mengatakan, Menteri Agama Fachrul Razi perlu mengajak berbagai pihak untuk merumuskan kembali batasan dan makna radikalisme.
<i><b>Causal Interpretation</b></i>	Karena dalam menangani radikalisme sebaiknya Menteri Agama tidak hanya menasar kepada hal-hal yang bersifat simbolik.
<i><b>Moral Evaluation</b></i>	Ahmad Fathul Bari menilai Menag perlu juga menangani radikalisme secara komprehensif dan holistic dengan melihat berbagai aspek
<i><b>Treatment Recommendation</b></i>	Fathul menyarankan Menag duduk bersama dengan berbagai perwakilan elemen masyarakat baik pemuka agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, akademisi dan sebagainya untuk merumuskan kembali makna radikalisme.

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/02/20385771/pks-minta-menag-tak-terjebak-simbol-dalam-atasi-radikalisme>, diakses 05 Desember 2019.

Berita yang keempat di analisis pada media Kompas.com ialah dengan judul “PKS Minta Menag Tak Terjebak Simbol dalam Atasi Radikalisme”. Pada elemen ***Problem Identification (pendefinisian masalah)*** berita ini, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari mengatakan, Menteri Agama Fachrul Razi perlu mengajak berbagai pihak untuk merumuskan kembali batasan dan makna radikalisme. Pada elemen ***Causal Interpretation (memperkirakan penyebab masalah)*** yang menjadi penyebabnya karena Fathul menilai dalam menangani radikalisme sebaiknya Menteri Agama tidak hanya menasar kepada hal-hal yang bersifat simbolik. Penilaian ini karena Fachrul Razi dalam menangani masalah radikalisme di Indonesia menasar pada aspek simbolik yang dianggap menjadi potensi orang akan terpengaruhi paham radikalisme. menyarankan agar radikalisme tidak hanya dirumuskan dengan simbol tertentu. Sebab, lanjut dia, simbol yang

digunakan justru berpotensi menimbulkan narasi kontraproduktif di kalangan masyarakat luas.

Sedangkan, elemen *Moral Evalution* (**membuat pilihan moral**) pada berita ini menurut Fathul, Menag juga perlu dalam menangani radikalisme secara komprehensif dan holistic dengan melihat berbagai aspek, tidak hanya secara simbolik saja. Menurutnya, PKS mendukung kebijakan Menag yang berpihak kepada masyarakat. Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan Menag Fachrul Razi untuk berhati-hati dalam menangani radikalisme. Mardani menyarankan Fachrul Razi agar menyampaikan konsepnya dalam menangani kelompok radikal. Mardani mengingatkan juga, jangan sampai penanganan kelompok radikal oleh Kementerian Agama menjadi keliru. Jika keliru, ia khawatir hal tersebut dapat memperbesar masalah di Indonesia.

Dan untuk *Treatment Recommendation* (**menekankan penyelesaian**) dalam menekankan penyelesaian ini Fathul menilai Menag perlu mendengarkan masukan berbagai pihak soal definisi radikalisme. Fathul menyarankan Menag duduk bersama dengan berbagai perwakilan elemen masyarakat baik pemuka agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, akademisi dan juga kalangan-kalangan lain yang menjadi stakeholder dari masyarakat itu sendiri sebagainya untuk merumuskan kembali makna radikalisme.

##### 5. Teks Berita Tanggapan Ahli terhadap pernyataan disampaikan Presiden

Judul : Soal Wacana Ganti Istilah Radikalisme, DPR Imbau Pemerintah  
Hati-hati

Sumber : Kompas.com

Waktu : Sabtu, 04 Nov 2019 18:00 WIB

**Tabel 4.19 Analisis model Entman pada berita “Soal Wacana Ganti Istilah Radikalisme, DPR Imbau Pemerintah Hati-hati”**

Elemen	Kompas.com
<b><i>Problem Identification</i></b>	Ace Hasan Syadzily menyikapi wacana Presiden Jokowi yang ingin mengganti istilah radikalisme agama dengan manipulator agama.
<b><i>Causal Interpretation</i></b>	Karena jika negara terlalu ikut campur dalam menyelesaikan masalah pemahaman keagamaan semacam ini akan menimbulkan kegaduhan.
<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Menurut Ace meski istilah radikalisme kerap mengundang perdebatan, ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam bertindak demi mencegah terjadi resistensi di antara masyarakat.
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	Ace menyarankan pemerintah untuk menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam dalam memerangi radikalisme agama.

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/04/18000381/soal-wacana-ganti-istilah-radikalisme-dpr-imbau-pemerintah-hati-hati>, diakses 05 Desember 2019.

Berita yang kelima di analisis pada media Kompas.com ialah dengan judul “Soal Wacana Ganti Istilah Radikalisme, DPR Imbau Pemerintah Hati-hati”. Pada elemen ***Problem Identification*** (**pendefinisian masalah**) berita ini, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menyikapi wacana Presiden Jokowi yang ingin mengganti istilah radikalisme agama dengan manipulator agama. Pada elemen ***Causal Interpretation*** (**memperkirakan penyebab masalah**) yang menjadi penyebab Ace menyikapi wacana Presiden Jokowi karena jika negara terlalu ikut campur dalam menyelesaikan masalah pemahaman keagamaan semacam ini akan menimbulkan kegaduhan. Sedangkan, elemen ***Moral Evaluation*** (**membuat pilihan moral**) pada berita ini Menurut Ace meski istilah radikalisme kerap mengundang perdebatan, ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam bertindak demi mencegah terjadi resistensi di antara masyarakat. Oleh sebab itulah Ace menanggapi masalah ini karena ditakutkan akan banyak permasalahan yang lebih kompleks jika pemerintah tidak berhati-hati dalam menyikapinya. Karena, ini mengarah ke pemahaman dari keagamaan yang sangat sensitive. Menurutnya, Perihal radikalisme agama, ia menilai hal tersebut sangat berbahaya karena melanggar nilai-nilai dalam agama itu sendiri. Seperti melanggar nilai-

nilai kemanusiaan, padahal sejatinya dalam agama seharusnya tidak boleh melakukan kekerasan.

Dan untuk *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian) yang diberikan, Ace menyarankan pemerintah untuk menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam dalam memerangi radikalisme agama. Ormas yang dimaksud adalah ormasn yang sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia. Karena menurutnya, keberadaan ormas ini harus diperdayakan, seperti melibatkan dalam berbagai kegiatan dakwah yang dilakukan dengan berkolaborasi.

Dari gambaran framing kelima berita diatas, dapat ditarik kesimpulan pemberitaan isu radikalisme di media online Kompas.com yaitu pemerintah siap melawan radikalisme, hal ini disampaikan selepas pelantikan kabinet kerja Presiden Jokowi jilid II. Adanya penyebab ini karena belakangan ini potensi-potensi radikalisme menguat di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Radikalisme yang dimaksud yaitu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan serta radikalisme juga yang merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi adalah salah. Dalam mengatasi hal ini Presiden Jokowi mencari cara agar ada upaya serius untuk mencegah meluasnya paham radikalisme tersebut. Upaya tersebut dengan mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama.

Dalam menanggapi pernyataan pemerintah terkait radikalisme, Ahmad Fathul Bari selaku juru bicara PKS agar pemerintah merumuskan kembali batasan dan makna radikalisme agar dalam proses menanganinya tidak hanya menasar kepada hal-hal yang bersifat simbolik karena berpotensi menimbulkan narasi kontraproduktif di kalangan masyarakat luas. Dalam menagani radikalisme, pemerintah perlu juga

menangani radikalisme secara komprehensif dan holistik dengan melihat berbagai aspek lainnya. Ace menyikapi wacana Presiden Jokowi karena jika negara terlalu ikut campur dalam menyelesaikan masalah pemahaman keagamaan semacam ini akan menimbulkan kegaduhan. Radikalisme kerap mengundang perdebatan, ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam bertindak demi mencegah terjadi resistensi di antara masyarakat.

Oleh sebab itulah Ace menanggapi masalah ini karena ditakutkan akan banyak permasalahan yang lebih kompleks jika pemerintah tidak berhati-hati dalam menyikapinya. Karena, ini mengarah ke pemahaman dari keagamaan yang sangat sensitive. Menurutnya, Perihal radikalisme agama, ia menilai hal tersebut sangat berbahaya karena melanggar nilai-nilai dalam agama itu sendiri. Seperti melanggar nilai-nilai kemanusiaan, padahal sejatinya dalam agama seharusnya tidak boleh melakukan kekerasan. Dari kesimpulan diatas berdasarkan 4 ciri dari paham radikalisme Kompas.com mencantumkan satu ciri yaitu revolusioner yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan diatas yang mengatakan “Seperti melanggar nilai-nilai kemanusiaan, padahal sejatinya dalam agama seharusnya tidak boleh melakukan kekerasan”

#### 4.4 Perbandingan Framing pada Media Online

Pandangan setiap media dalam melihat suatu isu akan berbeda-beda antar satu media dengan media yang lainnya. Perbedaan ini ada karena media satu dengan yang lainnya mempunyai latar belakang yang saling berbeda, baik dari sejarah berdiri, pemilik media, visi dan misi, serta ideologi yang dianut media akan sangat mempengaruhi isi dalam pemberitaan. Oleh sebab itu, peneliti membandingkan media online *Republika.co.id*, *Voa-Islam.com*, *Tempo.co*, dan *Kompas.com* untuk melihat bagaimana media tersebut memberitakan isu radikalisme. Setelah menguraikan perbandingan *frames* keempat media online tersebut yang berdasarkan elemen model

framing Entman, serta telah melihat bagaimana masing-masing media menyeleksi isu radikalisme ke dalam pemberitaan. Maka dengan adanya perbandingan ini, dapat melihat aspek-aspek apa saja yang ditonjolkan oleh masing-masing media. Oleh sebab itu, peneliti menguraikan perbandingan tersebut ke dalam tabel dengan deskripsi dimasing masing isu berita. Lalu menjelaskan perbedaan media dalam menekankan aspek yang ingin ditonjolkan. Setelah itu, dapat dilihat arah pandang dari masing-masing media dalam memandang isu pemberitaan tersebut. Karena, berdasarkan latar belakang masalah media tidak dapat dikatakan netral, pasti ada sebuah makna yang telah dibangun pada pemberitaan isu. Makna yang dibangun inilah yang menunjukkan media tersebut mengarah kemana, baik itu dalam bentuk pro dan kontra, memberitakan dan tidak memberitakan, memberitakan secara lengkap atau sederhana.

**Tabel 4.20 Perbandingan Berita Pernyataan Fachrul Razi selaku Menag terhadap isu Radikalisme**

<b>Elemen</b>	<b>Republika.co.id</b>	<b>Voa-Islam.com</b>	<b>Tempo.co</b>	<b>Kompas.com</b>
<b>Frame</b>	Jadi Menag, Fachrul Siapkan Terobosan Hadapi Radikalisme	Kata Menag, Radikal Itu Menjelek-jelekan Agama Lain dan Mengkafir-kafirkan	Fachrul Razi Buka-bukaan Soal Radikalisme dan Ustad Provokatif	Jadi Menteri Agama, Fachrul Razi Siap Lawan Radikalisme
<b>Problem Identification</b>	Fachrul Razi mengaku Presiden Jokowi memilihnya ia dianggap punya berbagai terobosan menghadapi radikalisme.	Fachrul Razi menegaskan, mereka yang menjelek-jelekan agama, serta mengkafirkan orang lain itu disebut radikal.	Fachrul Razi mengartikan radikalisme adalah orang yang berpikir menyelesaikan ketidaksepahaman atau permasalahan dengan cara kekerasan.	Fachrul Razi mengaku siap untuk melawan radikalisme.
<b>Causal Interpretation</b>	Karena radikalisme yang akhir-akhir ini semakin banyak.	Karena adanya fenomena tumbuhnya radikalisme berbasis agama belakangan ini.	Karena adanya potensi radikalisme yang dapat menghancurkan bangsa.	Karena adanya potensi-potensi radikalisme yang menguat belakangan ini.
<b>Moral Evaluation</b>	Fachrul Razi mengatakan Islam merupakan agama yang mengajak pada persatuan dan mengokohkan NKRI. Ia pun menilai bahwa jalan-jalan kekerasan merupakan penafsiran yang salah atas Islam.	Menurut Fachrul Razi, radikalisme agama tentu saja tidak boleh dimaknai sebagai paham keberagaman yang kuat dan mengakar, karena radikalisme semacam ini bukanlah sebuah ancaman.	Fachrul Razi menganggap kekerasan dalam bentuk apa pun itu radikal karena agama mengajarkan menyelesaikan masalah dengan musyawarah.	-
<b>Treatment Recommendation</b>	Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan sedang menyusun upaya-upaya yang dapat menangkal radikalisme yang muncul di Indonesia.	Fachrul Razi bersama Kementerian Agama, dengan Ormas Islam, tokoh-tokoh agama, serta lembaga-lembaga keagamaan senantiasa bersinergi untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan paham-paham keagamaan yang bertentangan dengan prinsip moderasi (wasathiyah).	Untuk menangani masalah radikalisme, Fachrul Razi menajamkan program yang sudah ada dan memberikan tindakan cepat jika ada yang dinilai bisa memprovokasi ke arah radikalisme untuk langsung di coret.	Untuk menangani masalah radikalisme, Fachrul Razi saat ini akan mempelajari dan menganalisa situasi terlebih dulu.

Tabel di atas merupakan hasil perbandingan *frames* dari pemberitaan media online Republika.co.id, Voa-Islam.com, Tempo.co, dan Kompas.com terkait pernyataan Fachrul Razi selaku Menteri Agama terhadap isu radikalisme. Berdasarkan *frame* judul berita di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id lebih melihat apa yang dilakukan Fachrul Razi setelah terpilihnya sebagai Menteri Agama. Lalu Voa-Islam.com melihat pandangan Fachrul Razi tentang apa yang disebut radikal. Sedangkan Tempo.co melakukan wawancara secara khusus kepada Fachrul Razi tentang apa itu radikalisme. Dan Kompas.com lebih fokus memberitakan bagaimana Fachrul Razi setelah diberi tugas untuk mengatasi radikalisme di Indonesia dengan menunjukkan bahwa ia siap lawan radikalisme.

Berdasarkan elemen *Problem Identification* di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id fokus melihat alasan kenapa Presiden Jokowi memilih Fachrul Razi sebagai Menteri Agama dengan alasan bahwa ia dianggap punya berbagai terobosan untuk menghadapi radikalisme. Lalu Voa-Islam.com lebih fokus tentang penjelasan radikal menurut Fachrul Razi yang ditugaskan sebagai Menteri Agama untuk menangani radikalisme di Indonesia bahwa yang dimaksud radikal itu mereka yang menjelek-jelekan agama, serta mengkafirkan orang lain. Sedangkan Tempo.co menanyakan pengertian radikalisme menurut Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, yang mengartikan radikalisme adalah orang yang berpikir menyelesaikan ketidak sepahaman atau permasalahan dengan cara kekerasan. Dan Kompas.com lebih menyorot perihal bagaimana kondisi Fachrul Razi usai dilantik sebagai Menteri Agama yang ditugaskan untuk menangani radikalisme, beliau mengaku siap untuk melawan radikalisme.

Berdasarkan elemen *Causal Interpretation* di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id memandang penyebab tugas yang diberikan kepada Menteri Agama karena adanya potensi-potensi radikalisme yang akhir-akhir ini semakin



banyak terjadi dan cukup kuat. Lalu Voa-Islam.com memandang penyebab Fachrul Razi mengatakan yang menjelek-jelekan agama lain dan mengkafirkan orang lain karena adanya fenomena tumbuhnya radikalisme berbasis agama belakangan ini. Sedangkan Tempo.co melihat penyebabnya radikalisme orang yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan karena adanya potensi radikalisme yang dapat menghancurkan bangsa, dengan kekerasan inilah yang menjadi akan ada perang antar kepercayaan paham yang dianut dengan landasan perbedaan. Dan Kompas.com memandang penyebabnya tugas yang diberikan kepada Menteri Agama karena adanya potensi-potensi radikalisme yang menguat belakangan ini.

Berdasarkan elemen *Moral Evaluation* di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id memberikan argumentasi Fachrul Razi, tentang pandangan Islam dan radikal yaitu ia mengatakan Islam merupakan agama yang mengajak pada persatuan dan mengokohkan NKRI, serta menilai bahwa jalan-jalan kekerasan yang diambil oleh paham radikal merupakan penafsiran yang salah atas Islam. Lalu Voa-Islam.com memberikan pandangan Fachrul Razi yang sebagai Menteri Agama memandang bahwa radikalisme agama tentu saja tidak boleh dimaknai sebagai paham keberagamaan yang kuat dan mengakar, karena radikalisme semacam ini bukanlah sebuah ancaman bagi Indonesia. Sedangkan Tempo.co memberikan pandangan Fachrul Razi tentang segala kekerasan dalam bentuk apa pun itu adalah radikal karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang dipercayai. Karena menurutnya agama mengajarkan ketika ada yang tidak sepaham atau berbeda pandangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah. Dan Kompas.com tidak memberikan argumentasi terkait evaluasi moral. Menunjukkan pemberitaan ini terkesan sederhana dan tidak lengkap, tidak ada penguatan moral dalam memandang peristiwa dan penyebab masalahnya.

Berdasarkan elemen *Treatment Recommendation* di masing-masing media menunjukkan, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) lebih memberikan pernyataan bahwa untuk menangani masalah radikalisme, Fachrul Razi sedang menyusun upaya-upaya untuk menangkul radikalisme di Indonesia. Lalu [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) menekankan penyelesaian yang diambil dengan tindakan Fachrul Razi bersama Kementerian Agama, dengan Ormas Islam, tokoh-tokoh agama, serta lembaga-lembaga keagamaan senantiasa bersinergi untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan paham-paham keagamaan yang bertentangan dengan prinsip moderasi (wasathiyah). Sedangkan [Tempo.co](http://Tempo.co) menyatakan bahwa untuk menangani masalah radikalisme, Fachrul Razi menajamkan program yang sudah ada dan memberikan tindakan cepat jika ada yang dinilai bisa memprovokasi ke arah radikalisme untuk langsung di coret. Dan [Kompas.com](http://Kompas.com) dalam memberitakan penyelesaian untuk mengatasi radikalisme, Fachrul Razi saat ini mengaku akan mempelajari dan menganalisa situasi terlebih dulu. Disini [Kompas.com](http://Kompas.com) memberikan gambaran bahwa Fachrul Razi masih belum statement kuat untuk diberitakan atas tugas yang diberikannya sebagai Menteri Agama.

Kesimpulan dari perbandingan pemberitaan isu pernyataan Fachrul Razi selaku Menteri Agama terhadap radikalisme pada keempat media online tersebut saling berbeda berdasarkan pengambilan fokus masalah yang dilihatnya. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menyoro ke arah alasan pemerintah memilih Fachrul Razi yang bukan dari ulama di beri tugas menangani radikalisme, terus menunjukkan bahwa Fachrul Razi masih menyusun upaya dalam menangkul radikalisme di Indonesia, belum ada bentuk tindakan yang nyata, sehingga terkesan terobosan yang menjadi alasan untuk menangani radikalisme seperti tidak dapat dibuktikan pada saat itu juga. Akan tetapi [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menekankan bahwa Islam yang mengajak persatuan dan mengokohkan NKRI, dari sini [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memberitakan orang Islam bukan apa yang dipandang oleh dunia bahwa penyebab radikal.

Berdasarkan gambaran dari arah pemberitaan ini, terlihat [Republika.co.id](http://Republika.co.id) mengarahkan bahwa Islam tidak seperti apa yang disorot sebagai agama teroris yang berpaham radikal. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) mengarahkan radikal sebagai sebuah bentuk kekerasan. Jika ada orang atau oknum kelompok yang mengaku beragama Islam dan dikatakan sebagai radikal radikal maka oknum tersebut telah keliru atau salah dalam menafsirkan agama Islam. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kutipan berita “jalan-jalan kekerasan merupakan penafsiran yang salah atas Islam”. Karena pada dasarnya dalam kutipan “Islam rahmatan lil alamin, kok bisa ngajak musuh apalagi sampai ngajak membunuh banyak manusia pasti ada yang salah“, menjelaskan bahwa Islam itu agama yang penuh akan rahmat. Dari sini terlihat bahwa media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) terkesan pro kepada umat Islam dengan melindungi, membela dan mengarahkan tuduhan radikal itu ke oknum bukan ke umat Islam.

Lalu [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) mengambil sumber berita ini dari media lain yaitu [vivanews.com](http://vivanews.com), tidak menulis sendiri, adanya pengambilan disini menunjukkan bahwa isi dari berita ini menunjukkan bahwa sesuai dengan pandangannya [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com). Dalam hal [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) menyorot pada Fachrul Razi sebagai Menag memandang radikal itu sebagai orang yang menjelek-jelekan agama dan mengkafirkan orang lain, dapat dilihat berdasarkan kutipan berita “mereka yang menjelek-jelekan agama, serta mengkafirkan orang lain itu disebut radikal“, pernyataan ini terkesan bahwa [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) ingin memberitakan pemerintah itu mengarahkan radikalisme itu ke orang Islam karena yang diketahui orang Islam lah yang saat ini sangat mudah sekali mengakirkan orang lain dan menjelek-jelekan agama lain yang tidak sama dan dinilai tidak toleransi. Telihat bahwa media ini sangat kontra kepada pemerintah, dengan secara terang-terangan atas nama pemerintah, menyinggung secara tidak langsung kelompok Islam yang selalu mengkafirkafirkan orang atau agama lainnya. Dimana dalam hal ini dapat mempengaruhi kerukunan hidup intra dan antar umat beragama di Indonesia.

Sedangkan Tempo.co dinilai sangat serius menangani hal ini karena sampai melakukan wawancara khusus kepada Fachrul Razi untuk melihat pandangannya terhadap radikalisme. Media ini menggambarkan bahwa Fachrul Razi mengarahkan radikalisme kepada orang melakukan kekerasan. Akan tetapi mengarahkan pemberitaan atau pernyataan itu kepada umat Islam itu radikal dengan cara melakukan kekerasan dan berpotensi sampai menghancurkan bangsa. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah mewaspadaui umat Islam yang melakukan kekerasan yang seperti ini yang dapat sangat berbahaya. Terlihat media ini menyudutkan umat Islam dengan memberitakan bahwa pemerintah yang mengatakan semua itu. Hal ini dapat dilihat dari kutipan “kalau ada orang membawa bendera Islam, tapi bicara tentang radikal, maunya main hantam, maunya main bunuh, ya udah lah, itu bukan ajaran Rasulullah itu”, pemberiaan contoh ini menunjukkan arah pembicaraannya kearah umat Islam.

Dan Kompas.com terkesan tidak peduli dengan isu ini, karena dalam pemberitaannya sangat sederhana dan tidak lengkap serta tidak menunjukkan pro dan kontra pada salah satu pihak. Dapat disimpulkan media ini tidak begitu tertarik dengan isu tersebut. Karena dalam pemberitaan ini, Kompas.com hanya memberitakan kesiapan seorang Fachrul Razi sebagai yang ditunjuk Menteri Agama yang mengaku siap melawan radikalisme, tanpa menuliskan arah pandangan Fachrul Razi terhadap isu radikalisme tersebut. Dapat dilihat dalam kutipan “Fachrul bahkan percaya diri ia dipilih Jokowi karena diyakini bisa melawan radikalisme yang menguat belakangan ini”, hanya menjelaskan kepercayaan diri Fachrul Razi dalam melawan radikalisme yang dipikir memiliki terobosan terbaru.

**Tabel 4.21 Perbandingan Berita Pernyataan Mahfud MD selaku Menkopolkam terhadap isu Radikalisme**

<b>Elemen</b>	<b>Republika.co.id</b>	<b>Voa-Islam.com</b>	<b>Tempo.co</b>	<b>Kompas.com</b>
<b>Frame</b>	Mahfud: Pemerintah tak Pernah Katakan Umat Islam Radikal	-	Mahfud MD: Pemerintah Tak Pernah Mengatakan Umat Islam Radikal	Mahfud MD: Pemerintah Tangani Radikalisme, Tak Peduli Islam atau Bukan
<b>Problem Identification</b>	Mahfud MD, mengatakan, pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam sebagai kelompok radikal	-	Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal.	Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal.
<b>Causal Interpretation</b>	Karena adanya kelompok radikal yang ingin mengganti Pancasila serta Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sedangkan justru umat Islam tidak radikal itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik.	-	Karena radikalisme itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan. Jadi salah mengatakan jika hanya orang Islam didiskriminasi dengan tuduhan radikal.	Karena radikalisme itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan. Jadi salah mengatakan jika hanya orang Islam didiskriminasi dengan tuduhan radikal, sebab baik orang Islam atau bukan, jika melakukan hal itu maka disebut radikal.
<b>Moral Evaluation</b>	Mahfud telah meminta masyarakat lebih jernih dalam melihat isu radikalisme agar tidak terlihat seolah-olah pemerintah memerangi kelompok tertentu saja. Ia pun menegaskan Muslim di Tanah Air pun menolak keberadaan paham radikal.	-	Mahfud meminta agar masyarakat tidak mendramatisir bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu.	Mahfud meminta agar masyarakat tidak mendramatisasi bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu.
<b>Treatment Recommendation</b>	Mahfud menegaskan dalam menangani aksi terorisme pun, aparat tidak pernah memilih berdasarkan agama, apakah Islam atau bukan. Bagi pemerintah, setiap paham radikal harus ditekan apa pun agamanya.	-	Mahfud mengatakan bahwa Pemerintah dalam menangani orang-orang berpaham radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak. Jika kebetulan ada yang Islam, pelaku ditindak karena radikalnya, bukan karena agamanya.	Mahfud memastikan pemerintah menindak radikalisme tanpa melihat dari agamanya, tidak peduli Islam atau tidak.

Tabel di atas merupakan hasil perbandingan *frames* dari pemberitaan media online Republika.co.id, Tempo.co, dan Kompas.com terkait pernyataan Mahfud MD selaku Menkopolhukam terhadap isu radikalisme. Media Voa-Islam.com untuk isu berita diatas tidak ikut memberitakan. Berdasarkan *frame* judul berita di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id mengutip pernyataan Mahfud bahwa Pemerintah tak pernah katakan umat Islam radikal. Lalu Tempo.co sama mengatakan seperti Republika.co.id hanya saja memberikan imbuhan me- pada kata “katakan” yaitu pernyataan Mahfud MD bahwa Pemerintah tak pernah mengatakan umat Islam radikal. Sedangkan Kompas.com sedikit berbeda dalam membuat frame judul berita dengan melihat tindakan Pemerintah dalam menangani isu radikalisme. Adapun pernyataan Mahfud MD tersebut, bahwa Pemerintah tangani radikalisme, tak peduli Islam atau bukan.

Berdasarkan elemen ***Problem Identification*** di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id menyatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD bahwa pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam sebagai kelompok radikal. Lalu Tempo.co juga menegaskan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md bahwa pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal. Sedangkan Kompas.com sama dengan media lain menegaskan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal. Dari ketiga media online ini memberitakan sama dalam menjadikan pernyataan Mahfud MD sebagai pendefinisian masalah.

Berdasarkan elemen ***Causal Interpretation*** di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id melihat penyebabnya karena menurut Mahfud kelompok radikal merupakan kelompok yang ingin mengganti Pancasila serta Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sedangkan pemerintah memandang karena umat Islam tidak radikal maka negara

ini sampai sekarang terjaga dengan baik. Secara implisit [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dalam menuliskan pernyataan Mahfud tentang penyebab negara ini terjaga dengan baik karena umat Islam tidak radikal, jika umat Islam radikal maka negara ini tidak akan baik-baik saja. Lalu [Tempo.co](http://Tempo.co) melihat penyebab masalah ini karena menurut Mahfud radikalisme itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan. Jadi salah jika mengatakan hanya orang Islam didiskriminasi dengan tuduhan radikal, sebab baik orang Islam atau bukan, jika melakukan hal itu maka disebut radikal. Sedangkan [Kompas.com](http://Kompas.com) hampir sama dengan [Tempo.co](http://Tempo.co) dalam memandang penyebabnya, yaitu karena menurut Mahfud radikalisme berdasarkan versi pemerintah yaitu itu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan. Jadi salah mengatakan jika hanya orang Islam didiskriminasi dengan tuduhan radikal, sebab baik orang Islam atau bukan, jika melakukan hal itu maka disebut radikal.

Berdasarkan elemen *Moral Evaluation* di masing-masing media menunjukkan, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memberikan argumentasi Mahfud atas permintaannya kepada masyarakat agar lebih jernih dalam melihat isu radikalisme, sehingga tidak terlihat seolah-olah pemerintah memerangi kelompok tertentu saja. Ia pun menegaskan Muslim di Tanah Air pun menolak keberadaan paham radikal. Lalu [Tempo.co](http://Tempo.co) memberikan argumentasi Mahfud atas permintaannya kepada masyarakat agar tidak mendramatisir bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu. Sedangkan [Kompas.com](http://Kompas.com) sama seperti [Tempo.co](http://Tempo.co) yang memberikan argumentasi Mahfud untuk meminta agar masyarakat tidak mendramatisasi bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu.

Berdasarkan elemen *Treatment Recommendation* di masing-masing media menunjukkan, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menekankan penyelesaian dengan penegasan sikap menangani aksi terorisme, aparat tidak memilih berdasarkan agama, apakah Islam atau bukan.

Bagi pemerintah, setiap paham radikal harus ditekan apa pun agamanya. Lalu Tempo.co menekankan penyelesaian dengan mengatakan bahwa Pemerintah dalam menangani orang-orang berpaham radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak. Jika kebetulan ada yang Islam, pelaku ditindak karena radikalnya, bukan karena agamanya. Sedangkan Kompas.com memberikan penyelesaian dengan memastikan pemerintah menindak radikalisme tanpa melihat dari agamanya, tidak peduli Islam atau tidak.

Kesimpulan dari perbandingan isu pernyataan Mahfud MD selaku Menkopolkam terhadap radikalisme pada keempat media online tersebut ialah Republika.co.id sama halnya dengan yang lain dalam memandang peristiwa yang menjadi permasalahan, akan tetapi berbeda sendiri dalam memandang melihat penyebab pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam radikal, lalu mengatakan bahwa karena umat Islam tidak radikal maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik yang dapat dilihat dari kutipan “umat Islam tidak radikal itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik”. Media ini setuju bahwa ada kelompok radikal yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi media ini secara berbeda dari media lain dan tegas mengatakan bahwa yang diduga sebagai kelompok radikal ini tidak berasal dari umat Islam, hal ini dapat dilihat berdasarkan kutipan “Mahfud mengatakan, jumlah kelompok radikal tidak banyak dan bukanlah umat Islam”. Keseluruhan media ini memberitakan secara apa adanya hanya saja menyisipkan sedikit kalimat yang menunjukkan bahwa umat Islam tidak radikal dan pro kepada Pancasila dan menolak paham radikalisme serta terkesan melindungi umat Islam dari tuduhan radikal, hal ini dapat dilihat dari kutipan “Ya pun menegaskan Muslim di Tanah Air pun menolak keberadaan paham radikal”.

Lalu media Tempo.co dan Kompas.com hampir sama dalam memberitakannya dan terlihat bahwa kedua media ini tidak mengarahkan atau memberitakan pembelaan secara tidak langsung ke umat Islam akan tetapi menyatakan pemerintah dalam menangani hal ini sudah berbuat benar. Dapat dilihat atas kedua media ini sama-sama menekankan bahwa “menegaskan pemerintah tidak



pernah mengatakan umat Islam itu radikal”, dan mengatakan dalam menangani atau menindak masalah radikalisme tidak berdasarkan agamanya orang itu. Akan tetapi kenapa yang menjadi ciri-ciri radikalisme itu fanatik agama, yang secara tidak langsung dilihat berdasarkan dia dalam mendalami agamanya, bukan dia beragama atau tidak. Disini menunjukkan bahwa kedua media ini langsung menggunakan kata menindak dan menangani sedangkan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggunakan kata memilih yang secara tahapannya terlihat tidak gegabah dalam memutuskan permasalahan radikalisme. Yang secara tidak langsung kedua media ini lebih condong ke arah pemerintah dan menjatuhkan umat Islam.

Sedangkan [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) tidak memberitakan isu ini menimbulkan dugaan yang mengarah bahwa pemberitaan isu ini tidak sesuai dengan arah pandang secara ideologi dianut media ini. Dan bisa merugikan jika dimasukkan ke dalam berita, karena bertentangan dengan *statement* yang dibangun dari awal. Pada isu ini pernyataan Mahfud menunjukkan bahwa pemerintah tidak menuduh umat Islam radikal, yang tidak sama dengan paham [Voa-Islam](http://Voa-Islam.com) yang bertentangan dengan pemerintah dan menganggap pemerintah mengarahkan radikalisme ke umat Islam.

**Tabel 4.22 Perbandingan Berita Pernyataan Jokowi selaku Presiden terhadap isu Radikalisme**

<b>Elemen</b>	<b>Republika.co.id</b>	<b>Voa-Islam.com</b>	<b>Tempo.co</b>	<b>Kompas.com</b>
<b>Frame</b>	Jokowi Usul Radikalisme Bisa Diganti Jadi Manipulator Agama	-	Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama	Jokowi Ingin Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama
<b>Problem Identification</b>	Presiden Jokowi mengusulkan agar istilah radikalisme yang sering kali digunakan diganti menjadi istilah 'manipulator agama'.	-	Presiden Jokowi sempat melontarkan wacana menggunakan istilah lain untuk mengganti kata radikalisme dengan manipulator agama	Presiden Joko Widodo ingin agar istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama.
<b>Causal Interpretation</b>	Karena kata radikalisme sekarang ini banyak disebut.	-	Karena untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia.	Karena menurut Jokowi harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya radikalisme ini dengan cara mencari istilah lain untuk menyebut orang-orang yang dianggap radikal
<b>Moral Evaluation</b>	Presiden Jokowi menekankan, bahwa masalah radikalisme ini harus menjadi perhatian pemerintah.	-	Radikalisme menjadi salah satu isu yang disorot oleh Presiden Jokowi. Ia memberi pesan khusus terkait hal ini saat memanggil para calon menteri satu per satu beberapa waktu lalu.	-
<b>Treatment Recommendation</b>	Presiden Jokowi kemudian menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar dapat mengoordinasikan masalah ini dengan jajaran menteri terkait.	-	Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menangani paham – paham radikalisme dengan mengkoordinir menteri-menteri terkait.	Presiden Jokowi menyerahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini

Tabel di atas merupakan hasil *frames* perbandingan dari pemberitaan media online Republika.co.id, Tempo.co, dan Kompas.com terkait pernyataan Jokowi selaku Presiden terhadap isu radikalisme. Media Voa-Islam.com untuk isu berita diatas tidak ikut memberitakan. Berdasarkan frame judul berita di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id membuat *frame* judul dengan usulan Jokowi bahwa radikalisme bisa diganti jadi manipulator agama. Lalu Tempo.co lebih usulan Jokowi untuk ganti istilah radikalisme jadi manipulator agama saja. Sedangkan Kompas.com membuat frame keinginan Jokowi untuk istilah radikalisme diganti jadi manipulator agama.

Berdasarkan elemen ***Problem Identification*** di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id melihat yang diidentifikasi sebagai frame pokok berita ini tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar istilah radikalisme yang sering kali digunakan diganti menjadi istilah manipulator agama. Lalu Tempo.co memuat terkait pernyataan Presiden Jokowi yang sempat melontarkan wacana untuk menggunakan istilah lain untuk mengganti kata radikalisme dengan manipulator agama. Sedangkan Kompas.com memandang Presiden Joko Widodo ingin agar istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama.

Berdasarkan elemen ***Causal Interpretation*** di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id melihat penyebab usulan Presiden Jokowi agar istilah radikalisme di ganti karena kata radikalisme sekarang ini banyak disebut sedangkan untuk mencegah perluasan radikalisme di masyarakatm Jokowi mengusulkan untuk diganti dengan manipulator agama. Lalu Tempo.co melihat penyebabnya karena untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia. Sedangkan Kompas.com memandang alasannya karena menurut Jokowi harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya radikalisme ini dengan cara mencari istilah lain untuk menyebut orang-orang yang dianggap radikal yaitu dengan manipulator agama.

Berdasarkan elemen *Moral Evaluation* di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id memberikan argumentasi penguat bahwa Presiden Jokowi menekankan masalah radikalisme ini harus menjadi perhatian pemerintah. Lalu Tempo.co menyatakan radikalisme menjadi salah satu isu yang disorot oleh Presiden Jokowi. Ia memberi pesan khusus terkait hal ini saat memanggil para calon menteri satu per satu beberapa waktu lalu. Sedangkan Kompas.com tidak memberikan argumentasi dalam moral evaluasi ini. Menunjukkan media ini tidak memberikan penguatan atas argumentasi pendefinisian masalah dan penilaian atas penyebab masalah berita ini. Sehingga media ini terkesan tidak lengkap dalam memberitakan isu tersebut.

Berdasarkan elemen *Treatment Recommendation* di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id menekankan penyelesaian dengan mencantumkan pernyataan Presiden Jokowi yang menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar dapat mengoordinasikan masalah ini dengan jajaran menteri terkait. Lalu Tempo.co juga sama menekankan penyelesaian dengan pernyataan Presiden Jokowi yang memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menangani paham – paham radikalisme dengan mengkoordinir menteri-menteri terkait. Sedangkan Kompas.com menekankan penyelesaian sama seperti media lainnya dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyerahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengoordinasikan masalah ini.

Kesimpulan dari perbandingan isu pernyataan Jokowi selaku Presiden terhadap radikalisme pada keempat media online tersebut sangat berbeda satu sama lain dalam memandang isu ini. Republika.co.id mengatakan bisa diganti istilah radikalisme, lalu menekankan radikalisme menjadi perhatian pemerintah jangan cuman sebagai isu yang bias, yang dapat ditafsirkan orang banyak. Disini dapat diambil kesimpulan Republika.co.id memandang isu pergantian istilah ini hanya seperti kemungkinan bisa saja diganti jika pemerintah fokus dalam menanganinya, sesuai

dengan kutipan “Jokowi Usul Radikalisme Bisa Diganti Jadi Manipulator Agama”. Lalu Tempo.co dalam memberitakan tidak memberikan penekanan pada *frame* dan terkesan seperti pergantian istilah ini hanya sebuah wacana-wacana Jokowi saja yang diperkirakan tidak bakal terjadi, sekadar pendapat yang tidak kuat, hal ini dapat dilihat dari kutipan “Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama”. Akan tetapi media ini menekankan pada isu radikalisme menjadi isu yang perlu disorot.

Sedangkan Kompas.com lebih dominan menyetujui pergantian istilah ini dengan menggunakan kata keinginan untuk istilah radikalisme diganti jadi manipulator agama, dapat dilihat dari kutipan “Presiden Joko Widodo ingin agar istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama”. Media ini sangat mendukung pergantian istilah tersebut karena istilah ini digunakan untuk menyebut orang-orang atau pelaku yang dianggap radikal. Media ini pro atas isu tersebut dalam melakukan pergantian istilah. Lalu media ini terkesan sangat tidak lengkap dalam memberitakan isu tersebut karena tidak dicantumkan moral penyelesaian. Dengan begini media Republika.co.id memandang isu tersebut boleh saja diganti, kalau Tempo.co tidak terlalu peduli pergantian istilah tersebut, lalu Kompas.com sangat mendukung atas pergantian istilah tersebut. Sedangkan Voa-Islam.com yang tidak memberitakan isu tersebut terlihat tidak peduli dan tertarik dengan pernyataan yang disampaikan Jokowi yang kemungkinan terkesan tidak penting.

**Tabel 4.23 Perbandingan Berita Tanggapan Tokoh terhadap isu Radikalisme yang disampaikan pemerintah**

<b>Elemen</b>	<b>Republika.co.id</b>	<b>Voa-Islam.com</b>	<b>Tempo.co</b>	<b>Kompas.com</b>
<b>Frame</b>	Din: Jangan Tuduh Umat Islam Radikal dan Intoleran	Din Syamsuddin: Tuduhan Radikal kepada Umat Islam Justru Dapat Kembangkan Radikalisme	Romo Magnis: Radikalisme Tidak Akan Mengambil Alih Negara Ini	PKS Minta Menag Tak Terjebak Simbol dalam Atasi Radikalisme
<b>Problem Identification</b>	Prof Din Syamsuddin menyampaikan bahwa sebagian umat Islam merasa terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi.	Din Syamsuddin mengkritisi tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme.	Romo Franz Magnis Suseno menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi	Fathul Bari mengatakan, Menteri Agama Fachrul Razi perlu mengajak berbagai pihak untuk merumuskan kembali batasan dan makna radikalisme.
<b>Causal Interpretation</b>	Karena tugas yang diberikan kepada Kemenag, menjadikan Kemenag berbelok anti radikalisme.	Karena menurut Din, tugas yang diberikan kepada Menag dalam mengatasi radikalisme sangat tendensius. Jika stigma radikal ini selalu diarahkan kepada kalangan Islam saja, maka itu justru dapat mengembangkan radikalisme.	Karena menurut Franz akar dari radikalisme ialah kemiskinan dan pemberantasan korupsi ialah cara untuk mengurangi kemiskinan itu.	Karena dalam menangani radikalisme sebaiknya Menteri Agama tidak hanya menasar kepada hal-hal yang bersifat simbolik.
<b>Moral Evaluation</b>	Din menegaskan, kelompok dan paham yang anti Pancasila harus ditolak tapi tidak hanya paham yang bersifat keagamaan. Sebab banyak juga kelompok yang ingin mengembangkan paham-paham lain yang anti Pancasila.	Din menegaskan radikalisme memang harus ditolak terutama dalam bentuk tindakan nyata yang ingin memotong akar (radix) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi Presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana karena radikalisme tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bersifat politik dan ekonomi	Menurut Franz lemahnya pemberantasan korupsi hanya akan menguntungkan segelintir kelas elite politik. Hal itu akan memperlebar ketimpangan ekonomi di masyarakat yang menjadi cikal bakal tumbuhnya radikalisme.	Ahmad Fathul Bari menilai Menag perlu juga menangani radikalisme secara komprehensif dan holistik dengan melihat berbagai aspek
<b>Treatment Recommendation</b>	Din mengingatkan, fungsi Kementerian Agama (Kemenag) untuk membangun moralitas bangsa dan mengembangkan keberagaman ke arah yang positif serta konstruktif bagi bangsa. Kemenag berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan serta kualitas keagamaan.	-	Franz mengatakan radikalisme tidak akan mengambil alih negara jika Presiden Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi	Fathul menyarankan Menag duduk bersama dengan berbagai perwakilan elemen masyarakat baik pemuka agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, akademisi dan sebagainya untuk merumuskan kembali makna radikalisme.

Tabel di atas merupakan hasil perbandingan *frames* dari pemberitaan media online Republika.co.id, Voa-Islam.com, Tempo.co, dan Kompas.com terkait tanggapan Tokoh terhadap isu radikalisme yang disampaikan pemerintah. Berdasarkan *frame* judul berita di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id mengambil pernyataan tokoh Islam terkait tanggapan perihal radikalisme yang di sampaikan pemerintahan, adapun *frame* judulnya terkait pernyataan Din Syamsuddin bahwa jangan tuduh umat Islam radikal dan intoleran. Lalu Voa-Islam.com juga mengambil pernyataan dari Din Syamsuddin juga bahwa tuduhan radikal kepada umat Islam justru dapat kembangkan radikalisme. Sedangkan Tempo.co mengambil berlawanan dari Republika.co.id dan Voa-Islam yang mengambil tokoh Islam sedangkan Tempo.co mengambil dari tokoh Katolik yaitu Romo Magnis yang menyatakan radikalisme tidak akan mengambil alih negara ini. Dan Kompas.com mengambil pernyataan dari tokoh PKS yang notabenehnya tokoh politik dari partai yang berlawanan dari pemerintah yang meminta Menteri agama tak terjebak simbol dalam atasi radikalisme

Berdasarkan elemen *Problem Identification* di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id memuat identifikasi masalah yaitu berdasarkan pernyataan Prof Din Syamsuddin selaku Wantim MUI yang menyampaikan bahwa sebagian umat Islam merasa terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi. Lalu Voa-Islam.com juga memuat pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Din Syamsuddin mengkritisi tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme. Sedangkan Tempo.co memuat pernyataan tokoh Katolik Romo Franz Magnis Suseno yang menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi. Dan Kompas.com mengutip pernyataan dari Fathul Bari selaku Juru Bicara Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) mengatakan, Menteri Agama Fachrul Razi perlu mengajak berbagai pihak untuk merumuskan kembali batasan dan makna radikalisme.

Berdasarkan elemen *Causal Interpretation* di masing-masing media menunjukkan, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang menjadi penyebabnya karena Din menganggap tugas yang diberikan kepada Kemenag, menjadikan Kemenag berbelok anti radikalisme. Bila Kemenag mendapatkan tugas tersebut menjadikan seolah-olah umat beragama yang radikal. Lalu [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) melihat penyebabnya Karena menurut Din, tugas yang diberikan kepada Menag dalam mengatasi radikalisme sangat tendensius. Jika stigma radikal ini selalu diarahkan kepada kalangan Islam saja, maka itu justru dapat mengembangkan radikalisme. Sedangkan [Tempo.co](http://Tempo.co) melihat penyebab masalah ini karena menurut Franz, akar dari radikalisme ialah kemiskinan dan pemberantasan korupsi ialah cara untuk mengurangi kemiskinan itu. Dan [Kompas.com](http://Kompas.com) memberikan alasan penyebab masalah ini karena dalam menangani radikalisme sebaiknya Menteri Agama tidak hanya menasar kepada hal-hal yang bersifat simbolik..

Berdasarkan elemen *Moral Evaluation* di masing-masing media menunjukkan, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menguatkan argumentasi Din yang menegaskan, kelompok dan paham yang anti Pancasila harus ditolak akan tetapi tidak hanya paham yang bersifat keagamaan. Sebab menurutnya masih banyak juga kelompok yang ingin mengembangkan paham-paham lain yang anti Pancasila. Lalu [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) memberikan argumentasi dari Din yang menegaskan radikalisme memang harus ditolak terutama dalam bentuk tindakan nyata yang ingin memotong akar (*radix*) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi Presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana karena radikalisme tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bersifat politik dan ekonomi. Sedangkan [Tempo.co](http://Tempo.co) mengambil argumentasi dari Franz yang mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi hanya akan menguntungkan segelintir kelas elite politik. Hal itu akan memperlebar



ketimpangan ekonomi di masyarakat yang menjadi cikal bakal tumbuhnya radikalisme. Dan Kompas.com memuat argumentasi dari Ahmad Fathul Bari yang menilai Menag perlu juga menangani radikalisme secara *komprehensif* dan *holistic* dengan melihat berbagai aspek

Berdasarkan elemen ***Treatment Recommendation*** di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id memberikan solusi dengan mengingatkan, fungsi Kemenag untuk membangun moralitas bangsa dan mengembangkan keberagaman ke arah yang positif serta konstruktif bagi bangsa. Din juga mengingatkan bahwa Kemenag berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan serta kualitas keagamaan. Lalu Voa-Islam.com tidak memberikan penekanan penyelesaian pada berita ini. Sedangkan Tempo.co menekankan penyelesaian dengan mengatakan radikalisme tidak akan mengambil alih negara jika Presiden Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan Kompas.com memuat penyelesaian dengan pendapat Fathul yang menyarankan Menag duduk bersama dengan berbagai perwakilan elemen masyarakat baik pemuka agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, akademisi dan sebagainya untuk merumuskan kembali makna radikalisme.

Kesimpulan dari perbandingan isu tanggapan tokoh terhadap radikalisme yang disampaikan pemerintah pada keempat media online tersebut sangat berbeda-beda. Republika.co.id dan Voa-Islam.com mengambil tanggapan dari narasumber yang sama yaitu dari Din Syamsuddin selaku mewakili MUI yang jelas menunjukkan kedua media ini selalu mempertimbangkan berdasarkan pendapat tokoh agama Islam. Akan tetapi, jadi sebuah sorotan yang berbeda terhadap Voa-Islam yang mengambil pendapat dari tokoh Ormas Muhammadiyah ini. Sedangkan Tempo.co mengambil tanggapan dari tokoh yang berlawanan yaitu Franz Magnis Suseno yaitu seorang tokoh katolik. Lalu Kompas.com mengambil tanggapan dari tokoh partai politik Islam yang bertentangan dengan pemerintahan sekarang karena PKS sebagai partai oposisi.

Dari isu tersebut sudah sangat terjawab media mana yang pro banget ke Islam dan pro banget ke agama lain lalu mengambil dari lawan pemerintahan sekarang.

Berdasarkan perbandingan arah pandangan pemberitaan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menekankan bahwa umat Islam terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi atas pemerintahan Indonesia yang menjadikan pilar dalam menangani keagamaan yaitu Menteri Agama, yang diberi tugas dalam masalah radikalisme, yang menjadikan radikalisme berasal dari umat beragama dan Din merasa diarahkan kepada umat Islam yang selalu tertuduh bermasalah dalam permasalahan radikalisme dan menyinggung soal kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kutipan “Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin menyampaikan bahwa sebagian umat Islam merasa terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi. Tuduhan tersebut terasa menyakitkan bagi umat Islam, padahal kalau umat Islam tidak toleransi tentu tidak akan ada stabilitas dan kerukunan di Indonesia”. Terlihat jelas [Republika.co.id](http://Republika.co.id) berbeda pendapat atas tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Agama. Pemberitaan ini menunjukkan penolakan atas pilihan pemerintah yang dapat mengarahkan radikalisme ke umat Islam. Lalu [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) lebih keras dan terang-terangan menunjukkan bahwa media ini tidak sepakat dan tidak akan pernah setuju atas tindakan pemerintahan saat ini. Hal ini terlihat karena dalam pemberitaan isu tersebut, [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) langsung mengatakan bahwa Din mengkritisi kebijakan yang diberikan kepada Menteri Agama dalam menangani radikalisme, dapat dilihat dari kutipan “Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin mengkritisi tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme”. Pemberian kebijakan ini ke Menag sangat tendesius diduga malah dapat mengembangkan paham radikalisme itu sendiri. Dan disini, [Voa-Islam.com](http://Voa-Islam.com) secara terang-terang bertolak belakang dengan pemerintah dengan menyatakan pemerintah tidak adil dan tidak bijaksana dalam menyingkapi permasalahan radikalisme yang berat

sebelah yaitu menyerang umat Islam saja, terlihat jelas dalam kutipan “Di sini, Presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana”.

Sedangkan Tempo.co dengan mengambil tokoh katolik lebih menekankan pada radikalisme tidak akan mengambil Negara Indonesia, jika yang dijadikan fokusnya itu dalam menguatkan masalah kemiskinan dan korupsi yang ada di Indonesia. Tempo.co kali ini memandang dengan cara berseberangan yaitu dengan memilih tokoh non-Islam dalam menanggapi perihal radikalisme ini dan mengalihkan arah pandangan bahwa radikalisme itu berasal dari umat Islam, hal ini menjadikan media ini tidak begitu ingin membahas dari sudut pandang agama akan tetapi dari sudut pandang keadaan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan kutipan “Tokoh Katolik Romo Franz Magnis Suseno menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat melawan penyebaran radikalisme melalui penguatan pemberantasan korupsi. Dia mengatakan akar dari radikalisme ialah kemiskinan dan pemberantasan korupsi”. Dan untuk Kompas.com lebih memilih tanggapan dari lawan politiknya pemerintahan saat ini. Media ini menekankan pada fokus batasan dan makna radikalisme yang dibuat pemerintah saat ini yang tidak konsisten dan jelas. Menurutnya malah mengarah kepada hal simbolik bukan berdasarkan *komprehensif* dan *holistic*. Dapat dilihat dari kutipan “Fathul Bari menilai, dalam menangani radikalisme sebaiknya tidak hanya menasar kepada hal-hal yang bersifat simbolik. Menag perlu melihat penanganan radikalisme harus secara komprehensif dan holistik melihat berbagai aspek”.

**Tabel 4.24 Berita Tanggapan Tokoh / Ahli terhadap pernyataan disampaikan Presiden Jokowi**

<b>Elemen</b>	<b>Republika.co.id</b>	<b>Voa-Islam.com</b>	<b>Tempo.co</b>	<b>Kompas.com</b>
<b>Frame</b>	Ahli: Sah Saja Ganti Radikalisme Jadi Manipulator Agama	Siapa Lagi Manipulator Agama Itu?	Kata Wamen Agama Soal Ide Radikalisme Jadi Manipulator Agama	Soal Wacana Ganti Istilah Radikalisme, DPR Imbau Pemerintah Hati-hati
<b>Problem Identification</b>	Ahli bahasa Sriyanto mengatakan sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo ingin mengganti kata 'radikalisme' menjadi 'manipulator agama'	Irma Setyawati mempertanyakan alasan mengapa istilah radikalisme diganti dengan manipulator agama, yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi.	Zainut Tauhid angkat bicara soal wacana Presiden Jokowi yang akan menggunakan istilah manipulator agama untuk mengganti radikalisme.	Ace Hasan Syadzily menyikapi wacana Presiden Jokowi yang ingin mengganti istilah radikalisme agama dengan manipulator agama.
<b>Causal Interpretation</b>	Karena Presiden tampaknya menangkap perkembangan makna radikalisme yang sangat luas atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat tertentu yang tidak menyenangkan, lalu dicari istilah lain.	Karena menurut Irma, label manipulator agama ini tidak jauh-jauh dari label radikalisme yang tentunya akan disematkan kepada umat Islam. Sehingga istilah manipulator ini hanya sebagai narasi yang lebih lunak saja untuk menyebutkan radikalisme.	Karena pelabelan istilah baru itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah meluasnya gerakan radikalisme.	Karena jika negara terlalu ikut campur dalam menyelesaikan masalah pemahaman keagamaan semacam ini akan menimbulkan kegaduhan.
<b>Moral Evaluation</b>	Sriyanto mengatakan penggunaan kata 'manipulator agama' mempunyai makna yang lebih mengerucut dan lebih jelas daripada pengertian radikalisme menurut yang beredar di masyarakat saat ini.	Menurut Irma, masyarakat sudah mulai sadar bahwa istilah radikalisme ini sasaran tembaknya adalah umat Islam. Sehingga, pemerintah saat ini sangat kebingungan menghambat laju kebangkitan umat Islam.	Menurut Zainut yang harus dipahami adalah semangat bapak presiden untuk memahami agama. Lalu maksud presiden menyebut frasa 'manipulator agama' mungkin bisa menjadi pengganti dari gerakan radikalisme.	Menurut Ace meski istilah radikalisme kerap mengundang perdebatan, ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam bertindak demi mencegah terjadi resistensi di antara masyarakat.
<b>Treatment Recommendation</b>	-	Irma meminta pemerintah untuk akhiri drama perang melawan terorisme, radikalisme atau manipulator agama. Itu hanya akan menambah keresahan dan keterpecahan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah fokus saja saat ini pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.	Zainut memberikan nama lain yakni perusuh agama.	Ace menyarankan pemerintah untuk menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam dalam memerangi radikalisme agama.

Tabel di atas merupakan hasil perbandingan *frames* dari pemberitaan media online Republika.co.id, Voa-Islam.com, Tempo.co, dan Kompas.com terkait tanggapan Tokoh / Ahli terhadap pernyataan disampaikan Presiden Jokowi. Berdasarkan *frame* judul berita di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id mengambil *frame* dari pendapat Ahli yang menyatakan sah saja ganti radikalisme jadi manipulator agama. Lalu Voa-Islam.com memilih *frame* dari opini publik dengan judul siapa lagi manipulator agama Itu ?. Sedangkan Tempo.co mengambil *frame* berita dari pernyataan Wamen Agama soal ide radikalisme jadi manipulator agama. Dan Kompas.com membuat *frame* dari pernyataan DPR yang menanggapi soal wacana ganti istilah radikalisme, DPR Imbau Pemerintah Hati-hati.

Berdasarkan elemen ***Problem Identification*** di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id memilih memuat pernyataan Ahli bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sriyanto yang mengatakan sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo ingin mengganti kata radikalisme menjadi manipulator agama. Lalu Voa-Islam.com memuat pernyataan dari Irma Setyawati mempertanyakan alasan mengapa istilah radikalisme diganti dengan manipulator agama yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Sedangkan Tempo.co mengambil pernyataan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid yang angkat bicara soal wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menggunakan istilah manipulator agama untuk mengganti radikalisme. Dan Kompas.com memuat pernyataan dari Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily yang menyikapi wacana Presiden Jokowi ingin mengganti istilah radikalisme agama dengan manipulator agama.

Berdasarkan elemen ***Causal Interpretation*** di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id dalam mengatakan penyebab tanggapan yang dilontarkan karena menurut Sriyanto, Presiden tampaknya menangkap perkembangan makna

radikalisme yang sangat luas atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat tertentu yang tidak mengenakan, dicari istilah lain. Lalu Voa-Islam.com melihat penyebabnya karena menurut Irma, label manipulator agama ini tidak jauh-jauh dari label radikalisme yang tentunya akan disematkan kepada umat Islam. Sehingga istilah manipulator ini hanya sebagai narasi yang lebih lunak saja untuk menyebutkan radikalisme. Sedangkan Tempo.co melihat penyebab masalah ini karena pelabelan istilah baru untuk radikalisme itu yang diutarakan Jokowi sebagai salah satu upayanya untuk mencegah meluasnya gerakan tersebut. Dan Kompas.com dalam menyatakan alasan penyebab masalah ini karena jika negara terlalu ikut campur dalam menyelesaikan masalah pemahaman keagamaan semacam ini akan menimbulkan kegaduhan.

Berdasarkan elemen *Moral Evaluation* di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id mengatakan dalam argumentasi Sriyanto dalam penggunaan kata manipulator agama mempunyai makna yang lebih mengerucut dan lebih jelas daripada pengertian radikalisme menurut yang beredar di masyarakat saat ini. Lalu Voa-Islam.com berdasarkan pendapat Irma bahwa masyarakat sudah mulai sadar dengan istilah radikalisme ini, yang sasaran tembaknya adalah umat Islam. Sehingga, pemerintah saat ini sangat kebingungan menghambat laju kebangkitan umat Islam. Sedangkan Tempo.co memberikan pendapat dari Zainut yang menekankan bahwa yang harus dipahami adalah semangat bapak presiden untuk memahami agama dan persoalan yang terjadi. Lalu maksud presiden menyebut frasa manipulator agama mungkin bisa menjadi pengganti dari gerakan radikalisme. Dan Kompas.com membuat argumentasi dari Ace yang mengatakan, meski istilah radikalisme kerap mengundang perdebatan, ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam bertindak demi mencegah terjadi resistensi di antara masyarakat.

Berdasarkan elemen *Treatment Recommendation* di masing-masing media menunjukkan, Republika.co.id tidak memberikan penekanan penyelesaian pada berita

ini. Menunjukkan media ini tidak memberikan sebuah jalan dalam menyelesaikan isu pergantian istilah ini, yang berarti dianggap mubah, tanpa perlu memfokuskan permasalahan ini. Lalu Voa-Islam.com menekankan penyelesaian dari permintaan Irma terhadap pemerintah untuk mengakhiri drama perang melawan terorisme, radikalisme atau manipulator agama. Menurutnya, itu hanya akan menambah keresahan dan keterpecahan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah fokus saja saat ini pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan Tempo.co memberikan solusi lain dari Zainut yang juga ingin memberikan nama lain untuk radikalisme yakni perusuh agama. Menurutnya apapun istilahnya, apakah itu manipulator agama atau perusuh agama, perusuh yang menciptakan situasi yang bisa menceraikan bangsa Indonesia, itu harus kita tolak bersama. Dan Kompas.com menekankan penyelesaian dengan menyarankan pemerintah untuk menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam dalam memerangi radikalisme agama.

Kesimpulan dari perbandingan isu tanggapan tokoh / ahli terhadap pernyataan disampaikan Presiden Jokowi pada keempat media online tersebut atas pemberitaan pernyataan Presiden mengganti istilah radikalisme. Republika.co.id menganggap pergantian istilah ini bisa saja sebagai bentuk fokus pemerintah. Oleh sebab itu dalam tanggapan ini, Republika.co.id mengatakan sah-sah saja mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama, hal ini dapat dilihat dari kutipan “Ahli bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sriyanto mengatakan sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo ingin mengganti kata 'radikalisme' menjadi manipulator agama”. Pada pemberitaan ini Republika.co.id mengambil dari Antara.com, yang menunjukkan kuat bahwa berita ini menjadi berita yang menunjukkan gambaran kuat arah pandang dalam menanggapi isu tersebut. Hal ini menunjukkan Republika.co.id ketika berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi terkesan baik

dan melindungi, dalam hal ini peneliti melihat adanya sebuah konspirasi berbeda, apakah ini terjadi karena Direktur Republika.co.id yaitu Erick Thohir yang menjabat sebagai menteri, melindungi citra dan selalu setuju dengan statement Presiden Jokowi

Sedangkan Voa-Islam.com menanggapi isu tersebut tanpa memberitakan berita pernyataan usulan pergantian istilah radikalisme akan tetapi menanggapi. Hal ini menjadi menarik karena dapat menunjukkan sebuah argumentasi kuat atas pandangan media ini dalam memberitakan isu tersebut. Tidak adanya pemberitaan dari pernyataan Presiden Jokowi atas pergantian istilah tersebut bisa menempatkan media ini menolak jika ada berita terkait Presiden Jokowi, akan tetapi kalau perihal menanggapi pernyataan dari pemerintah media ini selalu *getol* mengkritisi. Hal ini dapat dilihat dari arah pandangan pemberitaan di media ini, yang mengambil dari opinion khalayak dalam memberitakan isu tersebut dengan menggunakan *statement* yang sangat jelas menuduh bahwa pemerintah itu *biang kerok* dari radikalisme dan mengakambing hitamkan umat Islam sebagai sasarannya guna membungkam jika melakukan kebijakan yang sewenang-wenang, hal ini berdasarkan kutipan “mulai ada kesadaran di tengah masyarakat bahwa istilah radikalisme saat ini sasaran tembaknya adalah umat Islam saja sebagai reaksi sensitifitas pemerintah terhadap umat Islam yang *getol* mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak adil dan tidak mensejahterakan” dan “label manipulator agama ini juga tidak jauh-jauh dari label radikalisme, yaitu tentunya akan di sematkan kepada kepada umat Islam”. Voa-Islam.com menganggap pergantian istilah itu tidak ada gunanya karena itu sebagai sebuah narasi baru yang dapat lebih menyudutkan umat Islam sebagai akar dari radikalisme, yang sesuai dengan kutipan “Sehingga perlu ada narasi yang lebih lunak dari radikalisme, yaitu manipulator agama”

Sedangkan kalau media online Tempo.co melihat pergantian istilah itu sebagai upaya Presiden Jokowi untuk mencegah perluasan radikalisme dengan sikap kepeduliannya dalam penyebutan permasalahan tersebut. Hal ini Tempo.co dapat dikatakan setuju atas usulan tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah peduli dalam menangani masalah radikalisme ini, yang dapat



dilihat berdasarkan kutipan “Apapun istilahnya, apakah itu manipulator agama atau perusuh agama, perusuh yang menciptakan situasi yang bisa menceraikan bangsa Indonesia, itu harus kita tolak bersama saya kira itu yang harus dipahami adalah semangat bapak presiden memahami agama”. Dan Kompas.com memandang terkait pandangan pemberitaan ini mengambil dari tokoh DPR, yang mengingatkan bahwa sebagai sebuah kehati-hatian pemerintahan dalam mengambil setiap sikap dan keputusan, berdasarkan kutipan “pemerintah harus berhati-hati dalam bertindak demi mencegah terjadi resistensi di antara masyarakat”.

Disini dapat dinilai media ini menginginkan isu tersebut harus di diskusikan lebih dalam lagi agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Disini terlihat bahwa Kompas.com ingin membawa narasi radikalisme ini agar tidak salah dalam memahami dan menguraikannya, karena sangat sensitive yang membawa nama agama, sebaiknya merumuskan dengan organisasi masyarakat agama yang lebih mengetahuinya, yang dimana usulan tersebut terdapat dalam kutipan “Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah untuk menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam dalam memerangi radikalisme agama”. Kompas.com dalam imbaunnya terhadap pemerintah guna menangani masalah ini dengan tidak tergesa-gesa dan lebih rinci lagi.